

**PENENTUAN PRIORITAS SEKTORAL DALAM PENINGKATAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH  
DI PROPINSI JAWA TENGAH**



**SKRIPSI**

Dijadikan guru memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember



Asal : Hadiah  
Pembelian  
Terima : Tgl. 12 JUN 2003  
Oleh : No. Induk

S.  
Klass  
338.7  
MUO  
P  
0.1

**Mudayati**  
NIM. 990810101053

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2003**

## JUDUL SKRIPSI

PENENTUAN PRIORITAS SEKTORAL DALAM PENINGKATAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH  
DI PROPINSI JAWA TENGAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : M U D A Y A T I

N. I. M. : 990810101053

J u r u s a n : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

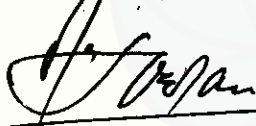
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

12 APRIL 2003

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

### Susunan Panitia Penguji

Ketua,



Drs. Bambang Yudono, MM

NIP. 130 355 409

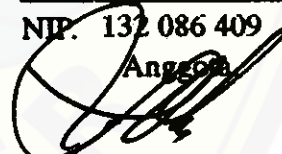
Sekretaris,



Aisyah Jumiaty, SE, M.Si

NIP. 132 086 409

Anggota



Drs. Sonny Sunarsono, MM

NIP. 131 759 836



Mengetahui/Menyetujui

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi

Dekan,



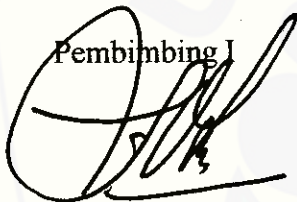
H. Liakip, SU

NIP. 130 531 976



TANDA PERSETUJUAN

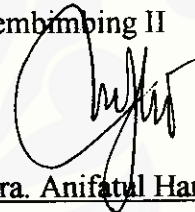
Judul Skripsi : Penentuan Prioritas Sektoral Dalam Peningkatan  
Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Propinsi Jawa Tengah  
Nama Mahasiswa : MUDAYATI  
NIM : 990810101053  
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi Perencanaan dan Industri



Drs. Sony Sumarsono, MM

131 759 836

Pembimbing II



Dra. Anifatul Hanim

131 953 240

Ketua Jurusan IESP



DR. H. Sarwedi, MM

131 276 658

Tanggal Persetujuan : 15 Maret 2003

**Kupersembahkan karya ini untuk:**

**Ayahanda Suparman dan Ibunda Suparti yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi serta perhatian dan kasih sayang**

**yang tulus kepada penulis,**

**perjuangan kalian tidak akan pernah terlupakan.**

**Karya sederhana ini sebagai wujud bhaktiku kepadamu**

**Eko Prihananto atas dukungan, perhatian, persahabatan, cinta**

**kasih dan kebersamaan yang indah**

**Almamaterku Fakultas Ekonomi Universitas Jember tercinta**

## MOTTO

.....Katakanlah: “Adakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui?

Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.”

(QS. AZ ZUMAR Ayat 9)

“.....Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang yang diberi pengetahuan, beberapa derajat.....”

(QS. AL MUJADALAH Ayat 58)

“Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)Nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun niscaya Dia akan melihat (balasan)Nya.”

(QS. AZ ZALZALAH Ayat 7 dan 8)

## ABSTAKSI

Alat analisis input-output pertama kali dikemukakan oleh Wassily Leontief tahun 1930. Analisis input-output cocok sekali digunakan dalam proses perencanaan pembangunan karena mempunyai kemampuan untuk melihat sektor demi sektor dalam perekonomian hingga tingkat yang sangat rinci. Perkembangan pembangunan utamanya dilakukan dengan menggunakan konsep keseimbangan. Keseimbangan tersebut dapat dilihat baik dalam konteks keseimbangan parsial maupun konteks keseimbangan umum. Keseimbangan parsial mengarah pada keseimbangan satu sektor saja dan biasanya dilakukan dengan asumsi *ceteris paribus*. Sedangkan keseimbangan umum mengarah pada satu kesatuan sistem, dengan keseimbangan di satu sektor berpengaruh terhadap keseimbangan sektor lain.

Analisis input-output merupakan suatu peralatan analisis keseimbangan umum yang didasarkan pada suatu situasi perekonomian. Keseimbangan dalam analisis input-output didasarkan pada arus transaksi antar pelaku perekonomian. Dengan analisis input-output dapat diketahui koefisien keterkaitan, *multiplier*, dan derajat ketergantungan ekspor serta *multiplier* ekspor. Koefisien keterkaitan, *multiplier*, derajat ketergantungan ekspor dan *multiplier* ekspor dapat digunakan untuk menentukan prioritas sektoral dalam pembangunan regional di Jawa Tengah.

Berdasarkan analisis keterkaitan, sektor prioritas dalam pembangunan regional di Jawa Tengah adalah sektor industri pengolahan. Oleh karena itu investasi harus diprioritaskan pada sektor industri pengolahan. Berdasarkan angka pengganda output sektor prioritas dalam pembangunan regional di Jawa Tengah adalah sektor industri pengolahan sebesar 2,12. Berdasarkan angka pengganda pendapatan sektor prioritas dalam pembangunan regional di Jawa Tengah adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 2,41. Berdasarkan angka pengganda ekspor terhadap tenaga kerja sektor prioritas dalam pembangunan regional di Jawa Tengah adalah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 6,41. Berdasarkan angka derajat ketergantungan ekspor sektor prioritas dalam pembangunan regional di Jawa Tengah adalah sektor pertanian sebesar 0,476631. Berdasarkan angka pengganda ekspor terhadap output sektor prioritas dalam pembangunan regional di Jawa Tengah adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 22,981196. Berdasarkan angka pengganda ekspor terhadap tenaga kerja sektor prioritas dalam pembangunan regional di Jawa Tengah adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,902521.

(Kata kunci : Keterkaitan, pengganda, ketergantungan ekspor)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Penentuan Prioritas Sektor dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Propinsi Jawa Tengah” dengan baik.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Drs. Sony Sumarsono, MM selaku dosen pembimbing I dan Dra. Anifatul Hanim selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Drs. H. Liakip, SU selaku dekan Fakultas Ekonomi beserta staff administrasi dan staff edukasi;
3. Drs. Teguh Hadi P, SE, M.Si yang telah memberikan bimbingan dalam analisis data;
4. Ayahanda Suparman dan Ibunda Suparti yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis baik moril maupun material. Perjuangan dan kasih sayang kalian tidak akan pernah aku lupakan;
5. Adikku Yuli dan Sri thanks untuk semangat, doa dan persaudaraan yang indah. Giatlah belajar, perjuangan kalian masih panjang;
6. Keluarga Bapak Soebandi, Mbak Elly yang telah menerima penulis sebagai bagian anggota keluarga;
7. Seseorang yang mengasihiku, semoga menjadi bagian hidupku dimasa depan. Thanks untuk cinta kasih dan kebersamaan yang indah;
8. Teman-teman IESP GL '99 Ani, Helmik, Dwi Yanti, dll. Semoga persahabatan kita tidak pernah terputus;
9. Teman-teman HMJ IESP periode 2001-2002 Mbak Irma, Mas Haeron, Hera, Apong, lain kali bikin kongres yang lebih gede;

10. Sahabat-sahabati sepergerakan di Halmahera I NO. 21, teruslah berjuang dan tetap semangat;
11. Teman-teman penghuni Jawa II D NO. 7 Emil, Iid, Manyun, dll. Bersama kalian hidup menjadi lebih hidup;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan para pembaca.

Jember, Maret 2003

Penulis

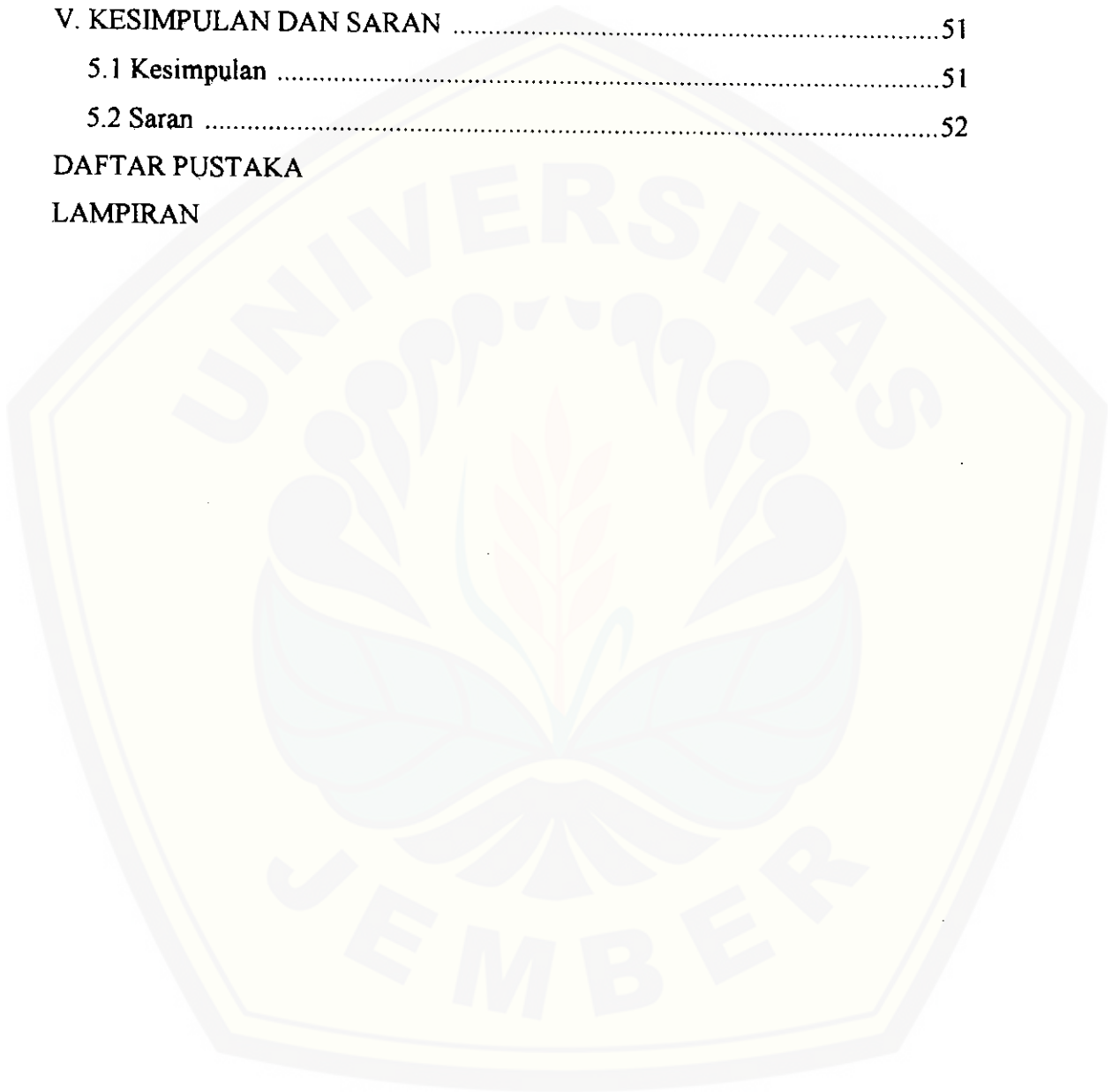


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAKSI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan dan Manfaat .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya .....	7
2.2 Landasan Teori .....	8
2.2.1 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah .....	8
2.2.1.1 Teori Basis Ekonomi .....	9
2.2.1.2 Teori Lokasi .....	10
2.2.1.3 Teori Tempat Sentral .....	10
2.2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah .....	12
2.2.3 Teori Pembangunan Seimbang dan Tidak Seimbang .....	15
2.2.4 Sektor Pemimpin .....	16
2.2.5 Analisis Input-Output .....	18
2.2.5.1 Analisis Keterkaitan ( <i>Linkage Analysis</i> ) .....	21
2.2.5.2 Analisis Pengganda ( <i>Multiplier Analysis</i> ) .....	22

2.2.5.3 Analisis Ketergantungan Ekspor dan Pengganda Ekspor .	23
III. METODOLOGI PENELITIAN .....	25
3.1 Rancangan Penelitian .....	25
3.1.1 Jenis Penelitian .....	25
3.1.2 Unit Analisis .....	25
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	25
3.3 Metode Analisis Data .....	26
3.3.1 Analisis Keterkaitan .....	26
3.3.1.1 Keterkaitan ke Belakang .....	26
3.3.1.2 Keterkaitan ke Depan .....	26
3.3.2 Analisis Pengganda .....	27
3.3.2.1 Pengganda Output .....	27
3.3.2.2 Pengganda Pendapatan .....	27
3.3.3.3 Pengganda Tenaga Kerja .....	27
3.3.3 Analisis Ketergantungan Ekspor dan Dampak Pengganda Ekspor .....	28
3.3.3.1 Analisis Derajat Ketergantungan Ekspor .....	28
3.3.3.2 Analisis Pengganda Ekspor .....	28
3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya .....	30
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	31
4.1 Deskripsi Daerah Penelitian .....	31
4.1.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	31
4.1.2 Penduduk dan Tenaga Kerja .....	32
4.1.3 Tingkat Produk Domestik Regional Bruto .....	35
4.2 Analisis Data dan Pembahasan .....	38
4.2.1 Analisis Keterkaitan Antar Sektor .....	38
4.2.2. Analisis Pengganda Output .....	40
4.2.3 Analisis Pengganda Pendapatan .....	42
4.2.4 Analisis Pengganda Tenaga Kerja .....	44

4.2.5 Analisis Ketergantungan Ekspor, Pengganda Ekspor terhadap Output, dan Pengganda Ekspor terhadap Tenaga Kerja .....	45
4.3 Pembahasan .....	47
V. KESIMPULAN DAN SARAN .....	51
5.1 Kesimpulan .....	51
5.2 Saran .....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

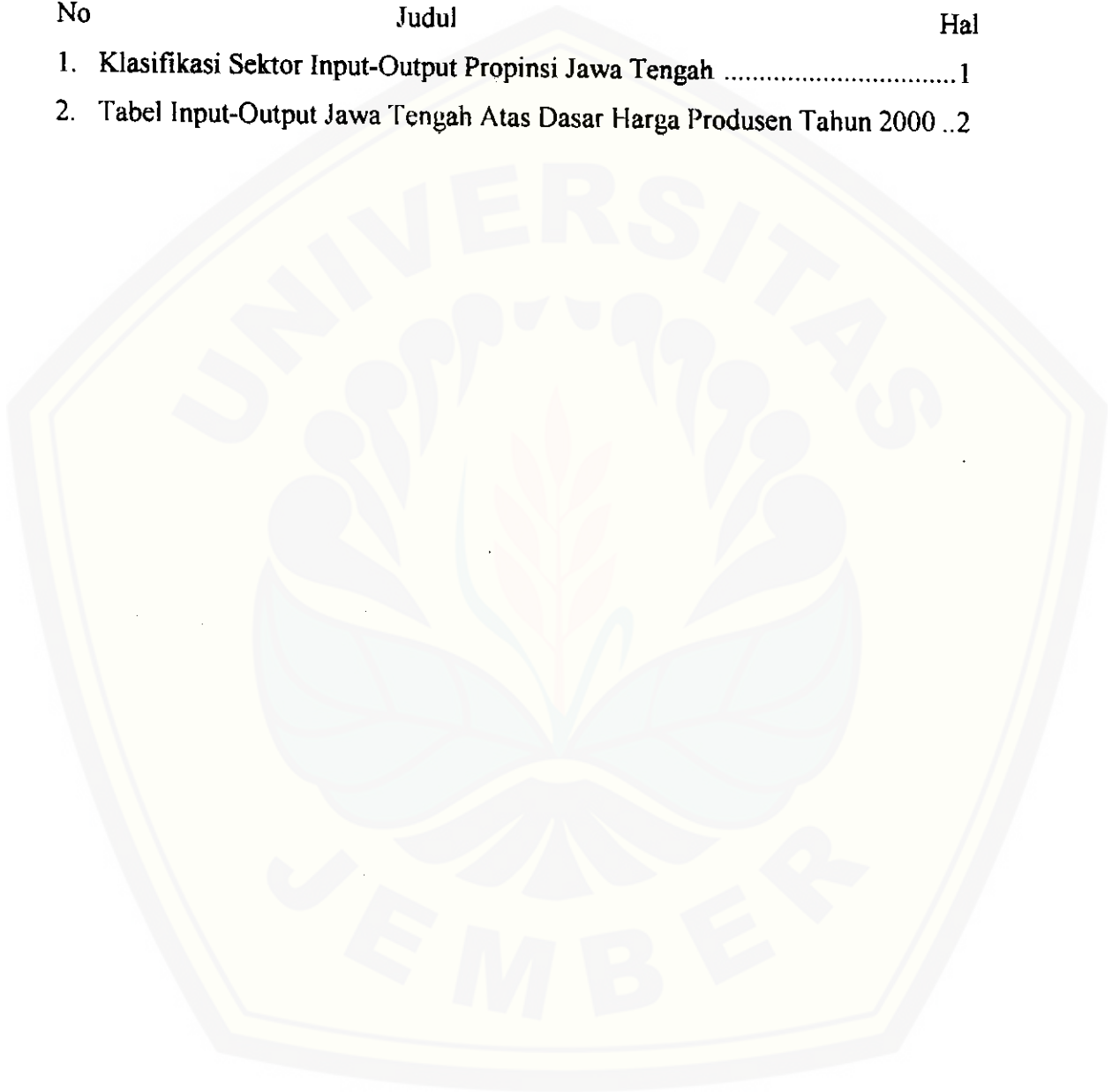


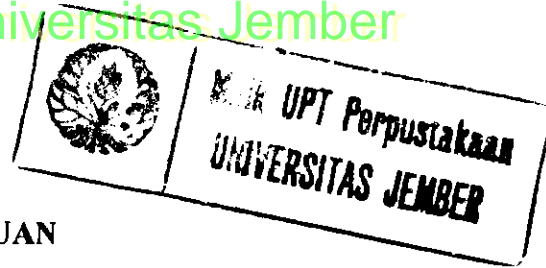
**DAFTAR TABEL**

No.	Judul	Hal
1.	Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah .....	11
2.	Tahapan dan Tugas Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah .....	14
3.	Bentuk Umum Tabel Input-Output .....	19
4.	Penduduk Jawa Tengah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2000 .....	33
5.	Penduduk Jawa Tengah Berumur 10 Tahun ke atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2000 .....	34
6.	Penduduk Jawa Tengah Berumur 10 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2000 .....	35
7.	Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1996-2000 .....	36
8.	Laju Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Jawa Tengah Tahun 1996-2000 .....	37
9.	Koefisien Keterkaitan Langsung, Langsung dan Tidak Langsung Sektor-Sektor Perekonomian Jawa Tengah .....	38
10.	Koefisien Pengganda Output Perekonomian Jawa Tengah .....	41
11.	Koefisien Pengganda Pendapatan Pada Perekonomian Jawa Tengah .....	42
12.	Koefisien Pengganda Tenaga Kerja Pada Perekonomian Jawa Tengah .....	44
13.	Koefisien Ketergantungan Ekspor, Pengganda Ekspor Terhadap Output, Pengganda Ekspor Terhadap Tenaga Kerja .....	46

**DAFTAR LAMPIRAN**

No	Judul	Hal
1.	Klasifikasi Sektor Input-Output Propinsi Jawa Tengah .....	1
2.	Tabel Input-Output Jawa Tengah Atas Dasar Harga Produsen Tahun 2000 ..	2





## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertumpu pada trilogi pembangunan. Sesuai dengan prioritas pembangunan dalam repelita, pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan perkembangan sektor pertanian dan sektor industri. Peningkatan itu disertai peningkatan penguasaan dan kualitas teknologi, agar dapat memberikan sumbangan yang optimal kepada pertumbuhan produksi daerah, ekspor dan pemerataan hasil-hasil pembangunan di daerah. Pembangunan sektor sosial, kependudukan dan sektor ekonomi dilaksanakan secara terpadu dalam rangka pembangunan wilayah. Secara keseluruhan pembanguan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan yang optimal, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, dan pada peningkatan pendapatan nyata, kesejahteraan sosial serta taraf hidup seluruh lapisan masyarakat (Muljana, 1995 :198).

Pembangunan regional di Indonesia saat ini telah memasuki tahap baru yang amat menentukan, tidak hanya bagi pengembangan potensi ekonomi daerah semata namun juga berpengaruh terhadap konfigurasi perekonomian nasional dimasa yang akan datang. Hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991. Undang-Undang ini meletakkan dasar-dasar hubungan pusat daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip: pertama, desentralisasi yang mengandung arti penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah daerah tingkat atasnya kepada daerah; Kedua dekonsentrasi, yang berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah atas kepada wilayah atau instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah; ketiga tugas pembantuan (*madebewind*) yang berarti pengkoordinasian prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi kepada daerah, yang memiliki fungsi

ganda sebagai penguasa tunggal di daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah (Kunçoro, 2000:406). Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi dan demokratisasi, apalagi jika dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas antara lain ditandai dengan tumbuhnya berbagai bentuk kerja sama regional dan perubahan pola/sistem informasi global.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharap mampu aktif memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien dan efektif termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasnya maupun kepada publik (Kosgoro, 2000:49).

Daerah harus memiliki perencanaan pembangunan regional yang matang dan didasarkan pada potensi yang dimiliki (*resource based*) dalam rangka pengembangan daerah di era otonomi. Perencanaan pembangunan regional sangat penting karena daerah memiliki keterbatasan sumber daya ekonomi sedangkan kebutuhan masyarakat tidak terbatas. Dengan perencanaan pembangunan regional daerah dapat melakukan efisiensi penggunaan sumber daya ekonomi yang terbatas sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Perencanaan regional ini mencakup perencanaan investasi dan penentuan prioritas sektoral yang akan dikembangkan. Penentuan prioritas sektoral ini penting untuk membentuk kompetisi daerah dalam persaingan dengan daerah luar dan juga untuk meningkatkan efisiensi investasi. Dengan demikian dimasa yang akan datang, diharapkan kabupaten di Indonesia dapat memiliki paling tidak satu kompetisi inti yang menjadi andalan dan penentu utama daya saing daerah. Konsep kompetisi inti pada dasarnya adalah upaya untuk mempersiapkan infrastruktur yang kuat, dengan mendasarkan diri pada pemetaan geografis (*geographical mapping*) yang baik untuk mengetahui potensi-potensi daerah yang dapat dikembangkan (Husseini, 2000).

Perencanaan dan pemetaan ini tentu saja membutuhkan teknik analisa ekonomi yang memadai untuk mengetahui keunggulan (*kompetitive advantage*) yang dimiliki daerah. Keunggulan ini dapat dikembangkan dalam perencanaan sektoral dengan menentukan sektor-sektor unggulan yang bisa menjadi lokomotif perkembangan perekonomian daerah. Dalam kerangka ini, reorganisasi analisa ekonomi menjadi tuntutan yang harus semakin dikembangkan di masa yang akan datang (Aziz, 1994:149).

Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dilakukan dengan langkah-langkah pendayagunaan aparatur. Langkah-langkah itu antara lain meliputi tindakan-tindakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tindakan-tindakan itu dijalankan melalui penggalan dan penyerahan potensi sumber pendapatan baru. Penggalan dan penyerahan itu akan dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak menghambat perkembangan dunia usaha (Muljana, 1995:199).

Sektor unggulan yang dipilih secara ekonomis harus memiliki struktur, perilaku dan kinerja yang baik. Dari sisi struktur, sektor tersebut harus memiliki derajat keterkaitan yang relatif paling tinggi dibanding dengan sektor yang lain, baik keterkaitan kedepan (*forward linkage*) maupun keterkaitan ke belakang (*backward linkage*). Selain itu, tingkat konsentrasi sektor tersebut harus rendah, untuk mencapai tingkat pemerataan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh sejumlah besar penduduk daerah. Dari sisi perilaku, sektor unggulan adalah sektor yang memiliki dampak pengganda (*multiplier effect*) yang paling besar, baik terhadap output, pendapatan maupun terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan kinerja sektor tersebut dapat dinilai berdasarkan derajat ketergantungan ekspor serta dampak pengganda ekspor terhadap output dan tenaga kerja (Koncoro, 2000:336).

Program Pembangunan Nasional (Propenas) menyebutkan bahwa kelemahan pelaksanaan pembangunan dimasa lalu telah melahirkan lima masalah utama pembangunan, salah satunya adalah lambatnya pemulihan ekonomi. Khusus untuk perekonomian regional memerlukan informasi ekonomi yang konsisten dan menyeluruh, mengingat bahwa pembangunan regional pada



dasarnya akan melibatkan berbagai kegiatan yang saling berkaitan didalamnya. Aspek kegiatan yang terkandung didalam kegiatan pengembangan regional baik aspek politis, ekonomi, sosial budaya maupun Pertahanan Keamanan Nasional (hankamnas) yang keseluruhannya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat simultan dari waktu ke waktu. Namun demikian pembangunan di bidang perekonomian merupakan salah satu sisi penting karena sifat kebutuhannya langsung dirasakan oleh masyarakat (BPS Jawa Tengah).

Peranan sektor-sektor perekonomian pada hakekatnya merupakan penggambaran dari adanya saling keterkaitan diantara sektor-sektor perekonomian tersebut yang kaitannya perlu dianalisis lebih lanjut terhadap sektor-sektor lainnya. Agar gambaran tersebut dapat tercakup diperlukan adanya suatu informasi yang memuat semua besaran nilai-nilai yang berkaitan dalam sektor-sektor perekonomian dalam hal ini dalam bentuk tabel input-output.

Propinsi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah juga perlu melakukan identifikasi terhadap berbagai potensi sektoral yang dimiliki, untuk kemudian menentukan alternatif pengembangannya. Menurut Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah selama tahun 1996-2000 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Tengah sebagian besar didukung oleh sektor industri pengolahan yaitu sebesar 31,84%, 31,79%, 30,76%, 30,55%, dan 30,35% dari total PDRB Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan, merupakan sektor yang mempunyai peranan penting dalam memberi sumbangan terhadap PDRB Propinsi Jawa Tengah. Selain sektor industri pengolahan, sektor lain yang memberikan sumbangan besar terhadap PDRB Jawa Tengah adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 21,58%, 22,29%, 22,98%, 22,91%, dan 23,53%. Sedangkan sektor pertanian hanya menduduki peringkat ketiga dalam PDRB Jawa Tengah dengan sumbangan sebesar 20,26%, 19,05%, 20,86%, 20,78%, dan 20,64%.

Angka-angka diatas masih perlu diolah dan dikaji lebih lanjut untuk menentukan prioritas sektoral yang akan dipilih. Hal ini karena prioritas sektoral harus memiliki prospek jangka panjang yang cerah, lebih daripada sekedar keunggulan jangka pendek. Aspek-aspek lain seperti keterkaitan sektoral masih

memerlukan analisis dan kajian lebih lanjut sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

## 1.2 Perumusan Masalah

Identifikasi sektor unggulan merupakan bagian penting dalam perencanaan regional, terutama dalam rangka otonomi daerah. Dalam penelitian ini, sektor unggulan hanya akan dilihat dari tiga kriteria, yaitu derajat keterkaitan, dampak pengganda sektoral dan derajat ketergantungan ekspor yang ditimbulkan. Penentuan prioritas sektoral dalam proses pembangunan disuatu wilayah dalam jangka panjang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. sektor apakah yang mempunyai koefisien keterkaitan terbesar, baik keterkaitan kedepan (*forward linkage*) maupun ketekaitan kebelakang (*bakward linkage*);
2. sektor apakah yang memiliki pengaruh perubahan permintaan akhir paling besar terhadap output, tenaga kerja, maupun pendapatan ;
3. sektor apakah yang memiliki pengaruh tingkat produksi paling besar terhadap ekspor dan pengaruh kegiatan ekspor paling besar terhadap output maupun tenaga kerja.

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

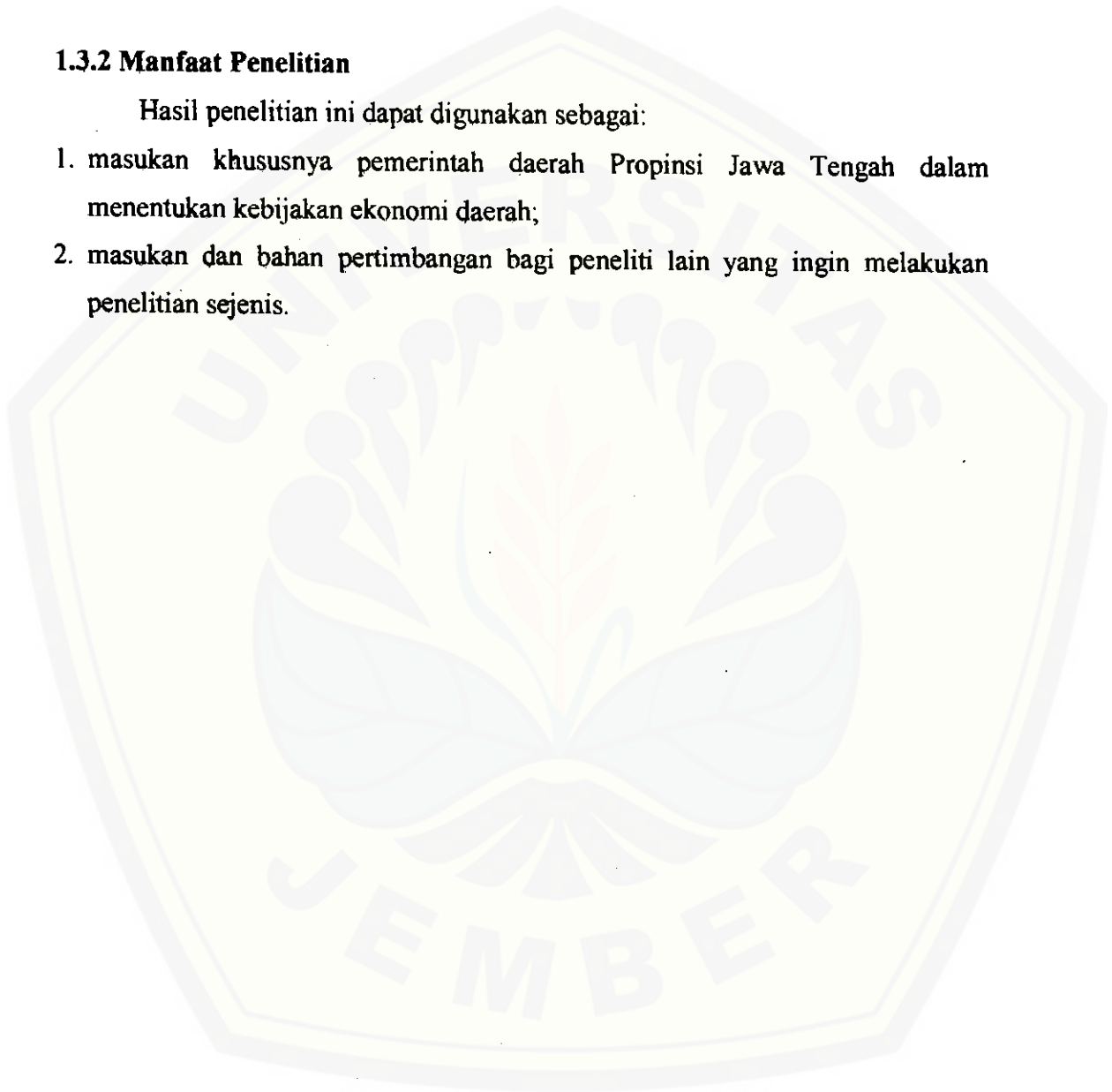
1. sektor unggulan Propinsi Jawa Tengah dilihat dari derajat keterkaitan sektor tersebut dengan sektor-sektor lain;
2. sektor unggulan Propinsi Jawa Tengah berdasarkan besar kecilnya dampak pengganda yang ditimbulkan, baik terhadap output, pendapatan maupun tenaga kerja;

3. sektor unggulan Propinsi Jawa Tengah berdasarkan besar kecilnya derajat ketergantungan ekspor dan dampak pengganda ekspor yang ditimbulkan baik terhadap output maupun tenaga kerja.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai:

1. masukan khususnya pemerintah daerah Propinsi Jawa Tengah dalam menentukan kebijakan ekonomi daerah;
2. masukan dan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan Saktiyanto (2000) tentang “Analisis Keterkaitan Antar Sektor di Kabupaten Jember” menyimpulkan bahwa:

1. sektor perkebunan tembakau dan sektor konstruksi merupakan sektor unggulan yang patut dijadikan prioritas dalam pembangunan sektoral;
2. sektor perkebunan tembakau memiliki daya persebaran sebesar 1,3619 dan derajat kepekaan sebesar 1,3641
3. sektor konstruksi memiliki daya persebaran sebesar 1,0396 dan derajat kepekaan sebesar 1,9189.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Halimy dengan judul “Penentuan Prioritas Sektoral dalam Pembangunan Regional di Kabupaten Sumenep” menyimpulkan bahwa:

1. sektor prioritas dalam pembangunan regional di Kabupaten Sumenep berdasarkan keterkaitan ke depan adalah sektor angkutan dan komunikasi (0,76240); sektor pertanian (0,65371); sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (0, 55668);
2. berdasarkan kriteria keterkaitan ke belakang sektor prioritas adalah sektor angkutan dan komunikasi (0,79185); sektor jasa (0,72468); sektor pertanian (0, 9671); sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (0,45855);
3. berdasarkan angka pengganda output sektor prioritas adalah sektor bangunan dan konstruksi (2,03); sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (1,79); sektor angkutan dan komunikasi (1,64); sektor industri pengolahan (1,57); sektor listrik, gas dan air bersih (1,55). Berdasarkan angka pengganda pendapatan sektor prioritas adalah sektor bangunan dan konstruksi (2,64); sektor industri pengolahan (1,62); sektor angkutan dan komunikasi (1,62); sektor perdagangan(1,50); sektor listrik, gas dan air bersih (1,50);



4. berdasarkan analisis kebocoran wilayah sektor prioritas adalah sektor pertambangan (0,0019); sektor pertanian (0,0133); sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (0,0223).

Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Persamaannya terletak pada analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan model analisis Input-Output. Sedangkan perbedaannya terletak pada daerah penelitian, data tahun yang digunakan.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah**

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan kita pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad,1997:274).

Saat ini tidak ada satu teoripun yang mampu untuk menjelaskan pembangunan ekonomi secara komprehensif. Namun demikian ada beberapa teori yang secara parsial dapat membantu kita untuk memahami arti penting pembanguan ekonomi daerah. Pada hakekatnya inti teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu.

Pengembangan metode yang menganalisis perekonomian suatu daerah penting sekali kegunaannya untuk mengumpulkan data tentang perekonomian

daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya, yang kemudian dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan yang ada.

Analisis perekonomian suatu daerah sulit dilakukan karena:

1. data tentang daerah sangat terbatas terutama kalau daerah dibedakan berdasarkan daerah nodal. Data yang sangat terbatas sangat sukar untuk menggunakan metode yang telah dikembangkan dalam memberikan gambaran mengenai perekonomian suatu daerah;
2. data yang tersedia umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk analisis daerah, karena data yang terkumpul biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan analisis perekonomian secara nasional;
3. data tentang perekonomian daerah sangat sulit untuk dikumpulkan, sebab perekonomian daerah lebih terbuka dibandingkan dengan perekonomian nasional;
4. bagi negara sedang berkembang, disamping kekurangan data sebagai kenyataan yang umum, data yang ada kebanyakan sulit dipercaya (Arsyad, 1997:275)

kalau analisis pembangunan nasional dibandingkan dengan analisis pembangunan daerah, maka akan tampak bahwa analisis pembangunan ekonomi daerah sangat ketinggalan, baik ditinjau dari cakupan analisis maupun kedalamannya. Disamping itu, analisis regional yang ada bertitik tolak dari analisis permasalahan dan kebijaksanaan pembangunan daerah di negara maju, padahal struktur perekonomian negara-negara maju sangat berbeda dengan struktur perekonomian negara sedang berkembang, demikian juga dengan struktur perekonomian daerahnya.

#### 2.2.1.1 Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*)

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk ekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah

dan penciptaan peluang kerja (*job creation*). Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun secara internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut.

Kelemahan model ini adalah bahwa model ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. Namun demikian, model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor-sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi (Arsyad, 1997:276).

#### 2.2.1.2 Teori Lokasi

Para ekonom sering mengatakan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah yaitu: lokasi, lokasi, lokasi! Pernyataan tersebut sangat masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung untuk meminimumkan biayanya dengan cara memilih lokasi yang memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar. Model pengembangan industri kuno menyatakan bahwa lokasi yang terbaik adalah biaya yang termurah antara bahan baku dengan pasar.

Tentu saja banyak variabel lain yang mempengaruhi kualitas dan suitability suatu lokasi misalnya upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas-fasilitas pendidikan dan latihan, kualitas pemerintah daerah dan tanggung jawabnya, dan sanitasi. Perusahaan-perusahaan yang berbeda membutuhkan kombinasi-kombinasi yang berbeda pula atas faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu seringkali masyarakat berusaha untuk memanipulasi biaya dari faktor-faktor tersebut untuk menarik perusahaan-perusahaan industri.

#### 2.2.1.3 Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral (*sentral place theory*) menganggap bahwa ada hierarki tempat (*hierarchy of places*). Setiap tempat sentral didukung oleh

sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

Teori sentral tempat ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Misalnya, perlunya melakukan perbedaan fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga. Beberapa daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan yang lain hanya sebagai wilayah pemukiman. Seorang ahli pembangunan ekonomi daerah dapat membantu masyarakatnya untuk mengembangkan peranan fungsional mereka dalam sistem ekonomi daerah.

Teori pembangunan daerah yang ada sekarang ini tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu suatu pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan dirumuskan disini untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 1: Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

KOMPONEN	KONSEP LAMA	KONSEP BARU
Kesempatan kerja	Semakin banyak perusahaan = semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah
Basis pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
Aset-aset lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumberdaya pengetahuan	Ketersediaan angkatan kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

Sumber: (Arsyad, 1997:278)



### 2.2.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat terutama di negara sedang berkembang, oleh karena itu campur tangan pemerintah tetap diperlukan bila ingin mencapai proses pembangunan yang lebih cepat. Pentingnya campur tangan pemerintah, terutama dalam pembangunan daerah dimaksudkan untuk mencegah akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati berbagai daerah yang ada.

Keadaan sosial ekonomi yang berbeda dari setiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembanguan antar daerah, mengakibatkan perbedaan kesejahteraan antardaerah., dan kalau hal ini dibiarkan dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi suatu negara. Gagasan ini timbul setelah melihat kenyataan bahwa, kalau perkembangan ekonomi diserahkan pada kekuatan mekanisme pasar, biasanya cenderung untuk memperbesar bukannya memperkecil ketidakmerataan antar daerah, karena kegiatan ekonomi akan menumpuk ditempat-tempat dan daerah tertentu, sedangkan tempat-tempat atau daerah-daerah lain akan semakin ketinggalan. Memusatnya ekspansi ekonomi disuatu daerah disebabkan berbagai hal, misalnya kondisi dan situasi alamiah yang ada, letak goeografis dan sebagainya. Ekspansi ekonomi suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga-tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan akan pindah kedaerah yang melakukan ekspansi tersebut. khususnya migrasi tenaga kerja, biasanya bersifat selektif, akibatnya migrasi itu sendiri pun cenderung untuk menguntungkan daerah-daerah yang sedang mengalami ekspansi ekonomi tersebut dan merugikan daerah-daerah lain.

Perpindahan modal cenderung menambah ketidakmerataan. Didaerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada giliranyan akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi

rendah karena pendapatan masyarakat yang rendah. Semua daerah-daerah yang dirugikan yang timbul karena adanya ekspansi ekonomi dari daerah disebut *backwash effect* Myrdal 1957 (dalam Arsyad, 1997:280).

Walaupun ada pengaruh yang kurang menguntungkan bagi daerah lain sebagai akibat dari adanya ekspansi ekonomi pada daerah tertentu, ada juga keuntungan bagi daerah-daerah disekitar dimana ekspansi ekonomi terjadi, misalnya terjualnya hasil produksi daerah, adanya kesempatan kerja baru, dan sebagainya. Pengaruh yang menguntungkan karena adanya ekspansi ekonomi suatu daerah ke daerah sekitarnya dinamakan *spread effect*. Andaikata *spread effect* ini lebih besar dibandingkan dengan *backwash* tentu tidak menjadi masalah. Namun kenyataannya didaerah miskin *spread effect* yang terjadi jauh lebih kecil daripada *backwash* yang dialami sehingga secara keseluruhan ekspansi ekonomi daerah kaya akan memperlambat pembangunan daerah miskin. Akibatnya tentu dapat diduga bahwa jurang kesejahteraan antara kedua daerah tersebut akan semakin melebar. Sesuai dengan pendapat Myrdal diatas, Hirschman 1958 (dalam Arsyad, 1997:280) juga mengemukakan bahwa jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka perkembangan itu akan membawa pengaruh atau imbas kedaerah lain. Menurut Hirschman, daerah disuatu negara dapat dibedakan menjadi daerah kaya dan daerah miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut menyempit berarti terjadi imbas yang baik (*trickling down effect*). Sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi proses pengkutuban (*polarization effect*).

Menurut Biakely 1989 (dalam Arsyad, 1997:284) ada enam tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 2: Tahapan dan Tugas dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

TAHAP	TUGAS
I	Pengumpulan dan analisis data <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penentuan basis ekonomi</li> <li>b. Analisis struktur tenaga kerja</li> <li>c. Evaluasi kebutuhan tenaga kerja</li> <li>d. Analisis peluang dan kendala pembangunan</li> <li>e. Analisis kapasitas kelembagaan</li> </ol>
II	Pemilihan strategi pembangunan daerah <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penentuan kemungkinan-kemungkinan tindakan</li> <li>b. Penyusunan strategi</li> </ol>
III	Pemilihan proyek-proyek pembangunan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi proyek</li> <li>b. Penilaian viabilitas proyek</li> </ol>
IV	Pembuatan rencana tindakan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prapenilaian hasil proyek</li> <li>b. Pengembangan input proyek</li> <li>c. Penentuan alternatif sumber pembiayaan</li> <li>d. Identifikasi struktur proyek</li> </ol>
V	Penentuan rincian proyek <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan studi kelayakan secara rinci</li> <li>b. Penyiapan rencana usaha (<i>business plan</i>)</li> <li>c. Pengembangan, monitoring, dan pengevaluasian program</li> </ol>
VI	Persiapan perencanaan keseluruhan dan implementasi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persiapan skedul implementasi rencana proyek</li> <li>b. Penyusunan program pembangunan secara keseluruhan</li> <li>c. Targeting dan marketing aset-aset masyarakat</li> <li>d. Pemasaran kebutuhan keuangan</li> </ol>

Sumber: Arsyad, 1997:284

### 2.2.3 Teori Pembangunan Seimbang dan Tidak Seimbang

Teori pembangunan seimbang didefinisikan sebagai usaha pembangunan yang berupaya untuk mengatur program input sedemikian rupa sehingga sepanjang proses pembangunan tidak akan timbul hambatan-hambatan yang bersumber dari penawaran maupun permintaan. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak di semua sektor yang saling berkaitan yang berfungsi meningkatkan penawaran barang. Sebaliknya sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan kerja yang lebih besar dan penambahan pendapatan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh (Arsyad, 1992:252). Apabila program pembangunan seimbang dilaksanakan, tingkat penanaman modal yang harus dilakukan besarnya jauh melebihi tingkat penanaman modal yang dilakukan pada masa sebelum usaha pembangunan dijalankan. Oleh karena itu pembangunan seimbang oleh sebagai ekonom disebut teori usaha besar-besaran atau *big push theory* (Sukirno, 1985:302).

Istilah pembangunan seimbang diciptakan oleh Nurkse tahun 1953 tetapi teori ini pertama kali dikemukakan oleh Rosenstein-Rodan tahun 1953. Kedua orang ini beranggapan bahwa melakukan industrialisasi di daerah yang kurang berkembang merupakan cara yang tepat untuk menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata di dunia dan untuk meningkatkan pendapatan di daerah semacam itu agar lebih cepat daripada daerah yang lebih kaya. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk menciptakan berbagai jenis industri yang berkaitan erat satu sama lain sehingga setiap industri akan memperoleh eksternalitas ekonomi sebagai akibat dari industrialisasi seperti itu (Arsyad 1992:254). Oleh karena itu negara sedang berkembang yang sedang membangun perlu melaksanakan program pembangunan seimbang karena pada waktu yang bersamaan dilakukan investasi diberbagai industri yang berkaitan erat satu sama lain. Dengan cara ini berarti pasar akan semakin luas, karena kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat yang diperoleh dari berbagai industri akan menciptakan permintaan akan barang-barang industri yang dihasilkan.

Sementara itu, teori pembangunan tidak seimbang merupakan keadaan yang berlawanan dengan keadaan pada pembangunan seimbang. Istilah ini digunakan untuk mengatakan bahwa program pembangunan disusun sedemikian rupa sehingga dalam perekonomian tersebut akan timbul kelebihan dan kekurangan dalam berbagai sektor sehingga menimbulkan distorsi-distorsi dan ketidakstabilan dalam perekonomian. Teori pembangunan tidak seimbang sesuai dengan gagasan Hirschman. Inti pokok dalam gagasan Hirschman berkisar pada pelaksanaan suatu strategi pembangunan yang tidak berimbang untuk menuju pada suatu struktur ekonomi yang lebih berimbang. Hirschman selanjutnya mengungkapkan segi keterkaitan diantara berbagai ragam kegiatan ekonomi. Hal ini menyangkut keterkaitan antar sektor maupun keterkaitan yang berlaku dalam lingkungan suatu sektor tertentu. Setiap proyek investasi disuatu industri tertentu selalu terkait dengan kegiatan di tahap yang menyusul dan/atau di tahap yang mendahului. Dalam hal keterkaitannya itu dengan kegiatan industri ditahap menyusul (industri hilir) maka keterkaitan itu bersifat *forward linkage*, sebaliknya keterkaitan yang menyangkut kegiatan industri di tahap yang mendahului (industri hulu) maka keterkaitan itu bersifat *backward linkage* (Djojohadikusumo, 1994 : 104).

#### 2.2.4 Sektor Pemimpin

Sektor pemimpin atau (*Leading sector*) adalah sektor yang mendapat prioritas pengembangan melalui pengembangan prioritas alokasi sumber daya ekonomi yang dimiliki. Pemilihan sektor prioritas di dasarkan pada kuatnya keterkaitan sektor tersebut dengan sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian. Dalam konteks perencanaan, sektor pemimpin ini memiliki banyak nama namun dengan karakteristik yang sama. Salah satu nama yang digunakan untuk menunjuk sektor pemimpin adalah sektor kunci.

Menurut Arief (1993:219), metode yang dapat digunakan untuk menentukan sektor kunci antara lain:

- a. sektor kunci adalah sektor yang memiliki derajat keterkaitan yang paling kuat, baik keterkaitan ke depan (*Forward linkage*) maupun keterkaitan ke belakang (*backward linkage*);
- b. sektor kunci adalah sektor yang menghasilkan output bruto relatif tinggi sehingga dapat mempertahankan *final demand* yang relatif tinggi juga;
- c. sektor kunci adalah sektor yang memiliki penerimaan devisa yang relatif paling tinggi;
- d. sektor kunci adalah sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja yang relatif paling tinggi.

Perroux (dalam Usman, 1988) menjelaskan ciri-ciri yang dimiliki oleh industri pemimpin (*leading Industries*) yaitu:

- a. relatif baru dan dinamis, serta mempunyai tingkat teknologi yang tinggi;
- b. permintaan terhadap produknya mempunyai elastisitas pendapatan yang tinggi;
- c. mempunyai kaitan antar industri, kaitan ke depan (*forward linkage*) dan kaitan ke belakang (*backward linkage*).

Menurut Koncoro (1997:336), keunggulan suatu sektor atau subsektor dapat dilihat dengan menganalisis struktur perilaku dan kinerjanya. Dari struktur sebuah sektor dapat dinilai dari:

- a. besar kecilnya keterkaitan ke belakang yang dimiliki;
- b. besar kecilnya keterkaitan ke depan yang dimiliki;
- c. derajat konsentrasi industri di sektor tersebut.

Perilaku industri dapat di analisis dari:

- a. besar kecilnya pengganda output yang dihasilkan;
- b. besar kecilnya pengganda pendapatan yang dihasilkan;
- c. besar kecilnya pengganda tenaga kerja yang ditimbulkan.

Kinerja sebuah sektor dapat di analisis dari:

- a. derajat ketergantungan ekspor sektor tersebut;
- b. dampak pengganda yang di timbulkan ekspor terhadap output;
- c. dampak pengganda yang ditimbulkan ekspor terhadap tenaga kerja.

### 2.2.5 Analisis Input Output

Analisis model input-output diperkenalkan oleh Prof Wassily W. Leontief pada tahun 1951. Model Input-Output merupakan pengembangan teknik yang dipergunakan oleh Francois Quesnay, dengan mempublikasikan *Tableau Economique* yang merupakan diagram-diagram yang memperlihatkan bagaimana pengeluaran-pengeluaran dapat dilacak melalui perekonomian dengan metode yang sistematis Miller dan Blair (dalam Kuncoro dkk, 1997:257)

Keampuhan model input-output menyangkut keampuhannya untuk mengukur keterkaitan antar sektor. Analisis ini tidak terbatas untuk nilai produksi, dengan memanfaatkan koefisien tenaga kerja maka dapat dihitung kemampuan suatu sektor untuk mengabsorpsi tenaga kerja (dampak langsung). Model input-output juga dapat menunjukkan sektor mana yang seharusnya diprioritaskan, sehingga sektor ini dapat menarik sektor-sektor yang lain yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di samping itu penggunaan tabel input-output mempunyai keunggulan analisis dalam perencanaan pembangunan secara simultan dan sangat menonjolkan hubungan dan keterkaitan antar sektor dalam perekonomian. Tabel input-output dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan suatu sektor terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan sektoral, misalnya keterkaitan antar sektor (*backward and forward analysis*), analisis dampak pengganda (*multiplier effect analysis*), yang sangat penting dalam perencanaan sektoral.

Menurut Gaspersz (1990:21), penyusunan tabel input-output ini harus memenuhi tiga asumsi, yaitu:

1. asumsi homogenitas yaitu suatu sektor memproduksi suatu output tunggal dengan struktur input tunggal, dan tidak ada substitusi otomatis antara berbagai sektor;
2. asumsi proporsionalitas yaitu dalam proses produksi hubungan antara input dengan output merupakan fungsi linear;
3. asumsi adivitas yaitu efek total pelaksanaan produksi diberbagai sektor dihasilkan masing-masing sektor secara terpisah.

Dengan asumsi-asumsi tersebut, model input output bersifat terbuka dan statis artinya rasio input-output tetap konstan sepanjang periode analisis.

Tabel 3. Bentuk Umum Tabel Input-Output

Alokasi Output Susunan Input			Permintaan Antara					Permintaan Akhir					Jumlah Output
			Sektor Produksi					RT	KP	I	S	E	
			i	...	j	...	n						
Input antara	Sektor Produksi	I	$X_{i1}$	...	$X_{ij}$	...	$X_{in}$	$RT_i$	$KP_i$	$I_i$	$S_i$	$E_i$	$X_i$
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		i	$X_{i1}$	...	$X_{ij}$	...	$X_{in}$	$RT_i$	$KP_i$	$I_i$	$S_i$	$E_i$	$X_i$
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	n	$X_{n1}$	...	$X_{nj}$	...	$X_{nn}$	$RT_n$	$KP_n$	$I_n$	$S_n$	$E_n$	$X_n$	
Upah dan Gaji RT			$L_i$	...	$L_j$	...	$L_n$						
Nilai Tambah Lain			$V_i$	...	$V_j$	...	$V_n$						
Impor			$M_i$	...	$M_j$	...	$M_n$						
Jumlah Input			$X_i$	...	$X_j$	...	$X_n$						

Sumber: Biro pusat statistik tahun 1995

$X_{ij}$  = banyaknya output sektor i (sektor menurut baris) yang digunakan sebagai input sektor j (sektor menurut kolom)

$Y_i$  = permintaan akhir sektor i (sektor menurut baris)  
 $= RT_i + KP_i + I_i + S_i + E_i$

Dimana

$RT_i$  = konsumsi rumah tangga terhadap sektor ke-i (sektor menurut baris)

$KP_i$  = konsumsi pemerintah terhadap sektor ke-i (sektor menurut baris)

$I_i$  = pembentukan modal tetap (output sektor ke-i yang menjadi barang modal)

$S_i$  = perubahan stock (output sektor ke-i yang menjadi perubahan stock)

$E_i$  = ekspor barang dan jasa terhadap sektor ke-i (sektor menurut baris)

Bentuk umum tabel input-output pada tabel 1 dapat dijelaskan sebagai berikut: tabel baris menunjukkan bagaimana output suatu sektor dialokasikan, sebagian dialokasikan untuk permintaan antara (*intermediate demand*) dan



sebagian untuk permintaan akhir (*final demand*). Permintaan akhir dalam tabel terdiri dari : (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga; (2) pengeluaran konsumsi pemerintah; (3) pembentukan modal tetap; (4) perubahan stock dan (5) ekspor. Tabel kolom menunjukkan penggunaan input antara maupun input primer yang disediakan oleh sektor lain untuk pelaksanaan produksi (Gaspersz, 1990: 218).

Secara umum dengan asumsi bahwa perekonomian hanya terdiri dari tiga sektor, dapat dinyatakan bahwa struktur input  $j$  (input menurut kolom) terdiri dari input antara  $X_{ij}$  ( $i= 1,2,3$ ) dan input primer  $V_j$  dengan demikian alokasi output sektor  $i$  (sektor menurut baris) dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$X_i = \sum_{i=1}^3 X_{ij} + F_i$$

Struktur input sektor  $j$  (sektor menurut kolom) dinyatakan sebagai berikut :

$$X_j = \sum_{i=1}^3 X_{ij} + V_j$$

Koefisien input teknik dari tabel input output dapat dirumuskan sebagai berikut (Gaspersz, 1990: 218) :

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$$

dimana :

$ij = 1, 2, 3 \dots n$

$a$  = koefisien input antara atau unit output sektor  $i$  (sektor menurut baris) yang dipakai sebagai input antara oleh sektor  $j$  (sektor menurut kolom) untuk menghasilkan satu unit output sektor  $j$  (sektor menurut kolom)

Dari koefisien teknis tersebut dapat dibentuk model input-output dalam notasi matriks, sebagai berikut (Gaspersz, 1990: 219) :

$$AX + F = X \Leftrightarrow F = X - AX \Leftrightarrow Y = [I - A] X \dots \dots (1)$$

Dimana:

A = matriks koefisien teknis

X = vektor kolom input total

F = vektor kolom permintaan akhir

$(I-A)^{-1}$  = invers matriks leontief

Persamaan (1) dapat diubah menjadi:

$$X = (I - A)^{-1} Y \dots \dots \dots (2)$$

$(I-A)^{-1}$  merupakan matriks kebalikan leontief atau disebut juga koefisien arah yang sangat berguna dalam analisis pembangunan wilayah. Koefisien tersebut juga menunjukkan keterkaitan antara tingkat permintaan akhir dengan output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian.

#### 2.2.5.1 Analisis Keterkaitan (*Linkage Analysis*)

Analisis keterkaitan digunakan untuk mengukur kaitan kegiatan ekonomi antar sektor dalam suatu wilayah. Ada tiga cara untuk mengukur keterkaitan antar sektor, yaitu: menghitung koefisien keterkaitan ke belakang (*backward linkage*), menghitung koefisien keterkaitan ke depan (*forward linkage*), dan menghitung jumlah transaksi tiap-tiap sektor baik menurut baris maupun menurut kolom.

Koefisien keterkaitan ke depan menunjukkan bahwa sektor yang memiliki nilai tinggi berarti sektor tersebut sangat penting kedudukannya terutama dalam menyediakan bahan masukan yang diperlukan oleh sektor-sektor terkait kepadanya. Koefisien keterkaitan ke depan ini ada dua macam yaitu: keterkaitan langsung ke depan (*direct forward linkage effect*), dan keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan (*total forward linkage effect*) (Budiharsono, 1986:122).

Koefisien keterkaitan ke belakang menunjukkan bahwa sektor yang memiliki nilai tinggi dapat dinyatakan bahwa sektor tersebut sangat tergantung pada sektor lain, sebagai peminta bahan masukan. Koefisien keterkaitan ke belakang ini ada dua macam yaitu: keterkaitan langsung ke belakang (*direct backward linkage effect*), dan keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang (*total backward linkage effect*) (Budiharsono, 1986:122).

Jumlah transaksi input-output tiap-tiap sektor dapat digunakan untuk mengukur besarnya keterkaitan sebuah sektor kepada sektor-sektor lainnya. Sektor yang memiliki transaksi yang banyak maka banyak sektor ekonomi yang terkait kepadanya. Ada dua jenis untuk menghitung jumlah transaksi, yaitu menurut baris dan kolom. Hasil jumlah baris menunjukkan banyaknya sektor yang terkait untuk menyediakan bahan masukan (input). Sedangkan hasil jumlah kolom menunjukkan sektor terkait kepada sektor tersebut dalam hubungan kegiatan memperoleh bahan masukan yang berasal dari keluaran sektor-sektor lain.

Pengembangan suatu komoditi pasti akan terkait dengan sektor lain, baik keterkaitan ke belakang maupun keterkaitan ke depan. Dari tinjauan wilayah keterkaitan antar sektor ini sangat penting artinya. Dengan melihat keterkaitan antar sektor maka akan dapat diidentifikasi adanya kebocoran wilayah. Pembangunan suatu wilayah melalui pengembangan komoditas tidak akan tercapai manakala dampak dari pengembangan wilayah tersebut tidak bisa ditangkap wilayah tersebut, artinya dampak yang ditimbulkan akibat investasi di suatu wilayah tidak dapat ditangkap oleh wilayah tersebut atau terjadi kebocoran wilayah.

#### 2.2.5.2 Analisis Pengganda (*Multiplier Analysis*)

Dalam tabel input-output pengganda tidak hanya menjelaskan satu besaran pengganda saja tetapi juga dapat menjelaskan beberapa besaran pengganda yang dinyatakan dalam matrik pengganda (*multiplier matrix*). Matrik pengganda dalam tabel input-output menjelaskan perubahan yang terjadi pada berbagai peubah endogen sebagai akibat perubahan pada satu atau beberapa peubah eksogen.

Analisis pengganda dalam tabel input-output digunakan untuk menentukan tingkat ketergantungan dari beberapa sektor ekonomi. Suatu sektor dengan koefisien pengganda yang besar mencerminkan bahwa sektor tersebut mempunyai hubungan yang kuat dengan sektor lain. Ada tiga variabel utama yang diperhatikan dalam analisis pengganda yaitu; pengganda output sektor-sektor produksi; pengganda pendapatan rumah tangga (*household income*); dan pengganda tenaga kerja (*employment*).

- a. Angka Pengganda Output, merupakan nilai total dari output yang dihasilkan oleh suatu sektor dalam perekonomian sebagai akibat adanya perubahan tingkat permintaan akhir sebesar satu satuan mata uang atau menunjukkan seberapa besar perubahan tingkat produksi dalam suatu perekonomian jika terjadi permintaan akhir (*final demand*) sebesar satu satuan mata uang;
- b. Angka Pengganda Pendapatan, merupakan jumlah total pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga sebagai penyedia faktor produksi sebagai akibat adanya tambahan permintaan akhir sebesar satu satuan mata uang atau dampak perubahan permintaan akhir (*final demand*) terhadap perubahan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga sebagai penyuplay faktor produksi;
- c. Angka Pengganda Tenaga Kerja, merupakan perubahan yang terjadi terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian sebagai akibat adanya perubahan permintaan akhir (*final demand*) sebesar satu satuan mata uang, secara sederhana angka pengganda tenaga kerja menunjukkan dampak perubahan permintaan akhir pada suatu sektor terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut.

Bagi suatu wilayah, angka pengganda mempunyai arti yang sangat besar. Pengganda ini dapat dijadikan indikasi seberapa besar pengaruh investasi yang dilakukan pada suatu sektor akan mempengaruhi perekonomian pada umumnya, melalui tenaga kerja, pendapatan dan permintaan akhir/output. Dengan diketahui suatu angka pengganda, maka dapat diketahui pula besarnya pengaruh akibat pengembangan suatu sektor.

#### 2.2.5.3 Analisis Derajat Ketergantungan Ekspor dan Pengganda Ekspor

Derajat ketergantungan ekspor menunjukkan proporsi produksi suatu subsektor yang secara langsung maupun tidak langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Indikator ini menunjukkan keterkaitan suatu sektor dengan aktifitas ekspor yang dilakukannya. Semakin tinggi derajat ketergantungan ekspor suatu subsektor berarti aktifitas pemasaran terhadap produk yang dihasilkan diorientasikan pada pasar luar negeri (ekspor) yang akan

meningkatkan ketergantungan sektor terhadap ekspor, dan semakin kecil tingkat ketergantungan ekspor dari suatu sektor menunjukkan bahwa orientasi pasar dari produk yang dihasilkan sektor tersebut hanya pasar domestik.

Angka pengganda ekspor memiliki kaitan dengan output yang dihasilkan oleh suatu sektor dan daya penyerapan sektor tersebut terhadap tenaga kerja dan output. Angka pengganda ekspor terhadap output merupakan nilai total output yang dihasilkan sebagai akibat adanya perubahan tingkat ekspor sebesar satu satuan mata uang, atau mengukur dampak aktifitas ekspor dari suatu sektor terhadap peningkatan output bagi perekonomian secara keseluruhan, sedangkan angka pengganda ekspor terhadap tenaga kerja menunjukkan dampak perubahan tingkat ekspor sebesar satu satuan mata uang terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja bagi keseluruhan perekonomian.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Rancangan Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai prospek sektor-sektor ekonomi dalam kerangka penentuan prioritas sektoral dalam perencanaan pembangunan regional di Propinsi Jawa Tengah, dilihat dari derajat keterkaitan, dampak pengganda, dan derajat ketergantungan ekspor yang ditimbulkan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

##### 3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah aktifitas ekonomi Jawa Tengah dilihat dari derajat keterkaitan antar sektor, dampak pengganda, dan derajat ketergantungan ekspor yang ditimbulkan, dalam pembangunan regional di Propinsi Jawa Tengah.

#### 3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari berbagai instansi yang berwenang di Propinsi Jawa Tengah dan studi pustaka yang mendukung penelitian ini. Data sekunder yang dipakai adalah data input-output Jawa Tengah klasifikasi  $19 \times 19$  sektor berdasarkan transaksi total atas harga produsen tahun 2000. Data sekunder antara lain diperoleh dari instansi-instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Tengah dan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Jawa Tengah yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.



### 3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 3.3.1 Analisis Keterkaitan

Untuk mengetahui koefisien keterkaitan antar sektor digunakan analisis sebagai berikut:

##### 3.3.1.1 Keterkaitan ke Belakang (*backward linkage*)

Untuk mengetahui keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) sebuah sektor dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut (Koncoro, 2001 : 248):

$$L_{bj} = \frac{\sum_{i=1}^n X_{ij}}{X_j} = \sum_{i=1}^n a_{ij}$$

dimana :

$L_B$  = indeks kaitan ke belakang

$X_j$  = nilai dari produk ke-j (produk menurut kolom)

$X_{ij}$  = nilai jasa i (jasa menurut baris) yang disediakan dari dalam negeri untuk memproduksi produk j (produk menurut kolom)

$a_{ij}$  = koefisien input-output leontief

##### 3.3.1.2. Keterkaitan Ke Depan (*forward linkage*)

untuk mengetahui keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dapat dihitung dari invers (balikan) rumus kaitan belakang (Kuncoro, 2001:248) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$L_{ij} = \sum a_{ij} - 1$$

Dimana :

$L_{ti}$  = indeks kaitan ke depan

$a_{ij}-1$  = koefisien input-output leontief

### 3.3.2 Analisis pengganda (*Multiplier Analisis*)

Untuk mengetahui pengaruh perubahan permintaan akhir terhadap total output, pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga, dan penyerapan tenaga kerja pada suatu perekonomian digunakan analisis sebagai berikut:

#### 3.3.2.1 Pengganda Output

Untuk mengetahui pengaruh perubahan permintaan akhir terhadap total output digunakan analisis pengganda output. Formulasi matematis untuk pengganda output adalah (Kuncoro, 2001:248):

$$O_j = \sum_{i=1}^n b_{ij}$$

Di mana:

$O_j$  = pengganda output (*output multiplier*) sektor ke- j (sektor menurut kolom)

$b_{ij}$  = permintaan akhir yang baru dari sektor-sektor yang lain

#### 3.3.2.2 Pengganda Pendapatan

Untuk mengetahui pengaruh perubahan permintaan akhir terhadap total pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga sebagai penyedia faktor produksi digunakan analisis pengganda pendapatan. Formula matematis untuk pengganda pendapatan adalah (Kuncoro, 2001:249):

$$H_j = \sum_{i=1}^n a_{n+1,i} b_{ij}$$

Di mana:

$H_j$  = pengganda pendapatan (*Income multiplier*) sektor ke- j (sektor menurut kolom)

$b_{ij}$  = permintaan akhir yang baru dari sektor-sektor yang lain

$A$  = koefisien teknologi

#### 3.3.2.3 Pengganda Tenaga Kerja

Untuk mengetahui pengaruh perubahan permintaan akhir terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja pada suatu perekonomian digunakan analisis



pengganda tenaga kerja. Formula matematis untuk pengganda tenaga kerja adalah (Koncoro, 2001:250):

$$E_j = \sum_{i=1}^n W_{n=l,i} I_{ij}$$

Di mana:

$E_j$  = pengganda tenaga kerja (*employment multiplier*) sektor ke-j (sektor menurut kolom)

$I_j$  = permintaan akhir yang baru dari sektor-sektor akhir

$W$  = koefisien input tenaga kerja

### 3.3.3 Analisis Ketergantungan Ekspor dan Dampak Pengganda Ekspor

#### 3.3.3.1 Analisis Derajat Ketergantungan Ekspor

Untuk mengetahui pengaruh tingkat produksi suatu subsektor yang secara langsung maupun tidak langsung dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan ekspor digunakan analisis derajat ketergantungan ekspor (Kuncoro, 2001:250). Secara matematis derajat ketergantungan ekspor dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$d_{ki} = \frac{\sum_{j=1}^n b_{ij} E_j}{X_i}$$

dimana:

$d_{ki}$  = derajat ketergantungan ekspor sektor i (sektor menurut baris)

$E_j$  = ekspor sektor j (sektor menurut kolom)

$b_{ij}$  = elemen invers matriks leontief

$X_i$  = total output sektor i (sektor menurut baris)

#### 3.3.3.2 Analisis Pengganda Ekspor

##### a. Analisis Pengganda Ekspor terhadap Output

Untuk mengetahui dampak aktifitas ekspor dari suatu sektor terhadap peningkatan output bagi perekonomian secara keseluruhan atau nilai total output

yang dihasilkan sebagai akibat adanya perubahan tingkat output sebesar satu satuan mata uang digunakan analisis pengganda ekspor terhadap output (Kuncoro, 2001:251). Formulasi angka pengganda ekspor terhadap output secara matematis adalah:

$$PO_i = \frac{\sum_{j=1}^n b_{ij} E_j}{\sum_{j=1}^n E_j}$$

dimana:

$po_i$  = pengganda ekspor terhadap output

$E_j$  = ekspor sektor j (sektor menurut kolom)

$b_{ij}$  = elemen invers matriks leontief

#### b. Analisis Pengganda Ekspor terhadap Tenaga Kerja

Untuk mengetahui dampak kegiatan ekspor suatu sektor terhadap penyerapan tenaga kerja bagi keseluruhan perekonomian atau menunjukkan dampak perubahan tingkat ekspor sebesar satu satuan mata uang terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja bagi keseluruhan perekonomian digunakan analisis pengganda ekspor terhadap tenaga kerja (Kuncoro, 2001:251). Formulasi angka pengganda ekspor terhadap tenaga kerja adalah sebagai berikut:

$$PL_i = \frac{l_i \sum b_{ij} E_j}{\sum E_j}$$

dimana:

$PL_i$  = pengganda ekspor terhadap output

$l_i$  = koefisien tenaga kerja sektor i (sektor menurut baris)

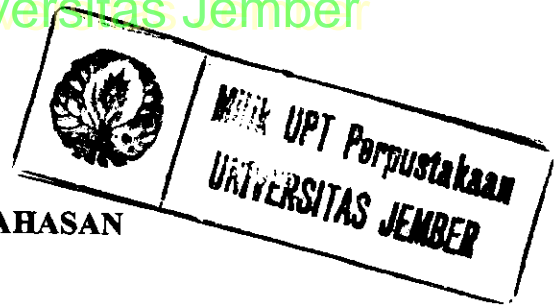
$E_j$  = ekspor sektor j (sektor menurut kolom)

$b_{ij}$  = elemen invers matriks leontief

### 3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya

Dalam penelitian ini definisi variabel operasional yang digunakan adalah:

1. Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh sebuah perekonomian daerah dihitung berdasarkan harga konstan. PDRB ini dinyatakan nilainya dalam rupiah;
2. jumlah output adalah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor produksi di suatu wilayah. Jumlah output dinyatakan nilainya dalam rupiah;
3. input antara adalah biaya yang dikeluarkan untuk barang dan jasa yang digunakan dalam melakukan proses produksi. Input antara nilainya dalam rupiah;
4. input primer adalah biaya yang timbul karena menggunakan faktor produksi dalam suatu kegiatan ekonomi. Input antara dinyatakan nilainya dalam rupiah;
5. impor adalah transaksi ekonomi dengan membeli barang dan jasa yang dilakukan dengan penduduk luar daerah Jawa Tengah. Impor dinyatakan nilainya dalam rupiah;
6. ekspor adalah transaksi ekonomi dengan menjual barang dan jasa keluar daerah Jawa Tengah. Ekspor dinyatakan nilai dalam rupiah.



#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Deskripsi Daerah Penelitian

###### 4.1.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Jawa Tengah sebagai salah satu propinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua propinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya antara  $5^{\circ}40'$  dan  $8^{\circ}30'$  Lintang Selatan dan antara  $108^{\circ}30'$  dan  $111^{\circ}30'$  Bujur Timur (termasuk Pulau Karimun Jawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan adalah 226 km (tidak termasuk Pulau Karimun Jawa). Batas-batas wilayah Jawa Tengah adalah; Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Timur sebelah selatan berbatasan dengan D.I Yogyakarta dan samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Jawa Barat. Dilihat dari batas wilayahnya Jawa Tengah mempunyai letak yang sangat strategis karena berada ditengah-tengah antara Jawa Timur, Jawa Barat, D.I Yogyakarta serta diapit oleh Samudara Hindia dan Laut Jawa. Letak strategis sangat berpengaruh terhadap arus barang dan jasa serta arus tenaga kerja dari dan ke-luar daerah yang berdampak langsung terhadap perkembangan sektoral dalam perekonomian Jawa Tengah.

Secara administrasi Propinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Wilayah tersebut terdiri dari 544 kecamatan, 8490 desa/kelurahan dan 31820 dusun/lingkungan. Luas wilayah Jawa Tengah pada tahun 2000 tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia). Luas yang ada terdiri dari 998 ribu hektar atau 30,67 persen lahan sawah dan 226 hektar atau 69,33 persen lahan bukan sawah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, luas lahan sawah tahun 2000 menurun sebesar 0,43 persen, sebaliknya lahan bukan sawah meningkat sebesar 0,19 persen. Hal ini menyebabkan output sektor pertanian menurun, sehingga kontribusinya terhadap PDRB juga menurun yang berdampak langsung terhadap perkembangan sektor lain yang terkait pada sektor pertanian dan permintaan akhir pada sektor pertanian.

Menurut stasiun Klimatologi Klas I Semarang, suhu udara rata-rata di Jawa Tengah tahun 2000 berkisar antara 18°C sampai dengan 28°C. Tempat-tempat yang letaknya dekat pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif lebih tinggi. Sementara itu rata-rata suhu air berkisar antara 21°C sampai 27°C. Sedangkan untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 74 persen sampai dengan 95 persen. Selama tahun 2000 curah hujan tertinggi terdapat di Stasiun Iklim Wadaslintang Wonosobo sebanyak 4277 mm, sedangkan untuk hari hujan terbanyak terdapat di Stasiun Meteorologi Cilacap sebanyak 247 hari. Curah hujan sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian. Untuk memproduksi output, sektor pertanian sangat tergantung pada curah hujan dan kelembaban udara. Daerah yang mempunyai curah hujan dan kelembaban udara yang tinggi mempunyai masa panen lebih banyak dari pada daerah yang kering sehingga output yang dihasilkan juga lebih banyak.

#### **4.1.2 Penduduk dan Tenaga Kerja**

Jumlah penduduk Jawa Tengah berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2000 tercatat sebesar 30,78 juta jiwa atau sekitar 15 persen dari jumlah penduduk Indonesia, dan menempati urutan ketiga dari seluruh propinsi di Jawa. Dari jumlah tersebut, jumlah penduduk perempuan lebih besar daripada jumlah penduduk laki-laki yaitu 15,5 juta jiwa penduduk perempuan dan 15,2 juta jiwa penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk berpengaruh langsung terhadap permintaan akhir (output yang dikonsumsi langsung). Perubahan permintaan akhir terhadap barang dan jasa menyebabkan perubahan total output, pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga yang menyediakan faktor produksi, dan penyerapan tenaga kerja pada suatu perekonomian.

Gambaran tentang penduduk Jawa Tengah berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin disajikan pada tabel 4

Tabel 4: Penduduk Jawa Tengah menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2000

Kelompok umur	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 - 4	1265139	1213207	2478346
5 - 9	1528736	1466928	2995664
10-14	1646986	1577017	3224003
15-19	1652146	1604529	3256675
21-24	1265627	1248978	2514605
25-29	1182774	1266456	2449230
30-34	1131303	1216785	2348088
35-39	1113643	1207011	2320654
40-44	1008003	1016814	2024817
45-49	850347	789431	1639778
50-54	650909	714002	1364911
55-59	543163	593688	1136851
60-64	511229	616408	1127637
65-69	369547	443114	812661
70-74	301675	297344	599019
75+	232211	250696	482907
<b>Jumlah</b>	<b>15253438</b>	<b>15500408</b>	<b>30775846</b>

Sumber: BPS Jawa Tengah

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk usia kerja di definisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun ke atas, dan dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk setiap tahun akan berpengaruh terhadap pertumbuhan angkatan kerja. Berdasarkan hasil Susenas, tenaga kerja di Jawa Tengah tahun 2000 mencapai 15,13 juta orang atau turun sebesar 0,51 persen dibanding tahun sebelumnya. Angka kesempatan kerja yang merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan penduduk yang termasuk angkatan kerja pada tahun 2000 terlihat cukup tinggi yaitu sebesar 95,78 persen. Hal ini dapat diyakini, bahwa angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah relatif kecil, yaitu sebesar 4.22 persen.

Gambaran tentang angkatan kerja di Jawa Tengah disajikan pada tabel 5.

Tabel 5: Penduduk Jawa Tengah Berumur 10 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2000

Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
10-14	101824	76865	178689
15-19	682641	499790	1182431
21-24	1017295	640032	1657327
25-29	1114552	674799	1789351
30-34	1103804	729130	1832934
35-39	1096606	799797	1896403
40-44	985126	695358	1680484
45-49	831127	559338	1390465
50-54	624097	457420	1081517
55-59	495674	361448	857122
60-64	416742	299221	715963
65-69	278143	185775	463918
70-74	181675	90819	272494
75+	93369	36655	130024
<b>Jumlah</b>	<b>9022675</b>	<b>6106447</b>	<b>15129122</b>

Sumber: BPS Jawa Tengah

Jumlah angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh penyerapan tenaga kerja pada suatu perekonomian. Jika penyerapan tenaga kerja tinggi maka jumlah pengangguran turun dan jumlah angkatan kerja naik. Peningkatan jumlah angkatan kerja akan meningkatkan koefisien pengganda tenaga kerja.

Selanjutnya, dari angkatan kerja yang ada sebagian besar dari mereka ternyata tidak/belum tamat Sekolah Dasar, bahkan banyak diantara mereka yang tidak pernah sekolah sama sekali. Penduduk Jawa Tengah sebagian besar hanya menyelesaikan pendidikan sampai Sekolah Dasar yaitu sebesar 4,6 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa program pendidikan 9 tahun yang dicanangkan pemerintah belum berhasil secara maksimal.

Gambaran tentang tingkat pendidikan para angkatan kerja di Jawa Tengah di sajikan pada tabel 6.

Tabel 6: Penduduk Jawa Tengah Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2000

Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/belum pernah sekolah	848802	2119807	2968609
Tidak/belum tamat SD	2958994	3092205	6051199
Sekolah Dasar	4613445	4489118	9102561
SLTP	1963256	1659886	3623142
SLTA	1692867	1223063	2915930
Diploma I/II/III	187698	143769	331467
Diploma IV/S1/S2/S3	194501	114427	308928
<b>Jumlah</b>	<b>12459563</b>	<b>12842273</b>	<b>25301836</b>

Sumber: BPS Jawa Tengah

Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat memproduksi barang dan jasa yang berkualitas sehingga mampu bersaing dengan daerah lain. Dalam proses produksi diperlukan input dari sektor lain dan menghasilkan output untuk sektor lain, sehingga tercipta keterkaitan antar sektor. Jika input dan output diproduksi oleh sumber daya manusia yang berkualitas maka hasilnya akan berkualitas.

#### 4.1.3 Tingkat Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto merupakan tolak ukur keberhasilan perekonomian daerah. PDRB menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh sebuah perekonomian daerah, dan sekaligus menjelaskan besaran aktivitas ekonomi daerah. Dengan melihat nilai PDRB dapat dinilai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu daerah.

Apabila PDRB suatu daerah dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang positif, hal ini berarti terdapat peningkatan aktivitas perekonomian yang tergambar dalam peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi di daerah tersebut. Struktur PDRB kabupaten dapat digunakan untuk melihat kinerja masing-masing sektor dalam memberikan kontribusi terhadap nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh perekonomian wilayah.



Tabel 7: Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Atas Dasar harga Konstan Tahun 1996-2000

Sektor	Tahun 1996	Tahun 1997	Tahun 1998	Tahun 1999	Tahun 2000
1. Pertanian	8487971,93 (20,28%)	8216026,20 (19,05%)	7940632,03 (20,86%)	8184670,67 (20,78%)	8447654,98 (20,64%)
2. Pertambangan dan galian	527557,05 (1,26%)	587426,67 (1,36%)	545662,76 (1,43%)	525612,99 (1,46%)	589963,78 (1,44%)
3. Industri pengolahan	13327648,25 (31,84%)	13709758,32 (31,79%)	11707062,06 (30,76%)	12036861,68 (30,55%)	12421426,24 (30,35%)
4. Listrik, gas dan air bersih	345833,47 (0,83%)	393556,61 (0,91%)	407879,93 (1,07%)	450221,11 (1,14%)	493724,43 (1,21%)
5. Bangunan	2011485,33 (4,81%)	2139684,09 (4,96%)	1452845,56 (3,82%)	1626238,40 (4,13%)	1650463,27 (4,03%)
6. Perdagangan hotel dan restoran	9034329,60 (21,58%)	9612930,14 (22,29%)	8747296,31 (22,98%)	9026900,22 (22,91%)	9631793,24 (23,53%)
7. Pengangkutan dan komunikasi	1705241,76 (4,07%)	1766846,11 (4,10%)	1765265,71 (4,64%)	1946926,99 (4,94%)	2053018,42 (5,02%)
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	2114567,23 (5,05%)	2283522,22 (5,29%)	1502666,55 (3,95%)	1559305,07 (3,96%)	1605968,43 (3,92%)
9. jasa-jasa	4306569,10 (10,29%)	4420088,54 (10,25%)	3995962,44 (10,50%)	3987776,61 (10,12%)	4038526,07 (9,87%)
<b>Jumlah</b>	<b>41862203,72</b>	<b>43129838,90</b>	<b>38065273,35</b>	<b>39394513,74</b>	<b>40932538,43</b>

Sumber: BPS Jawa Tengah

Tabel 7 menunjukkan bahwa secara nominal perekonomian Jawa Tengah mengalami kenaikan dalam perolehan PDRB. Tahun 1996 total PDRB Jawa Tengah sebesar 4.862.203,72 rupiah, sedangkan pada tahun 1997 meningkat menjadi 43.129.838,90 rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 7,3%. Namun adanya krisis ekonomi nasional pada tahun 1998 menyebabkan perekonomian Jawa Tengah berkontraksi hingga minus 11,74% dengan total PDRB sebesar 38.065.273,35. Adanya *recovery* ekonomi selama tahun 1999-2000 menyebabkan perekonomian Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan meningkatnya PDRB sebesar 39.394.513,74 dan 46.932.538,43.

Struktur PDRB selama tahun 2000 menunjukkan bahwa sektor yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah sektor industri pengolahan sebesar 30,35% dari total PDRB dan sektor perdagangan, hotel dan restoran

sebesar 23,53%. Tingginya kontribusi sektoral terhadap PDRB tidak menjamin bahwa sektor tersebut merupakan sektor prioritas, sektor prioritas harus mempunyai struktur, perilaku dan kinerja yang relatif tinggi dibanding sektor lain.

Bila dilihat dari laju pertumbuhan sektoral, terlihat bahwa pada tahun 1998 semua sektor perekonomian di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini disebabkan oleh dampak krisis ekonomi yang melanda perekonomian nasional. Sektor yang mengalami pertumbuhan negatif paling besar adalah sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yaitu sebesar -43,2%, sedangkan satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan positif selama tahun 1998 adalah sektor listrik, gas, dan air bersih yaitu sebesar 3,64%. Tahun 1999 dan 2000 perekonomian Jawa Tengah sudah mulai tumbuh dengan laju pertumbuhan sebesar 3,8% tahun 2000. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling besar adalah sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 9,66% walaupun peranannya terhadap PDRB hanya sebesar 1,21%. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah adalah sektor jasa sebesar 1,27%. Sektor industri pengolahan yang memberikan sumbangan tertinggi terhadap PDRB Jawa Tengah ternyata hanya mengalami pertumbuhan sebesar 3,19%.

Tabel 8: Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Jawa Tengah tahun 1996-2000

Lapangan Usaha	1996	1997	1998	1999	2000
1. Pertanian	3,37	-3,20	-3,35	3,07	3,21
2. Pertambangan dan galian	11,85	11,35	-7,11	5,49	2,49
3. Industri pengolahan	8,71	2,87	-14,61	2,82	3,19
4. Listrik, gas dan air bersih	14,03	13,47	3,64	10,38	9,66
5. Bangunan	11,24	6,37	-32,10	11,93	1,49
6. Perdagangan hotel dan restoran	8,35	6,40	-9,00	3,20	6,70
7. Pengangkutan dan komunikasi	12,88	3,61	-0,09	10,29	5,45
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	7,11	7,99	-34,20	3,77	2,99
9. jasa-jasa	4,13	2,64	-9,60	-0,20	1,27
<b>PDRB</b>	<b>7,30</b>	<b>3,03</b>	<b>-11,74</b>	<b>3,49</b>	<b>3,80</b>

Sumber: BPS Jawa Tengah

Jumlah output yang dihasilkan oleh suatu sektor dan permintaan akhir terhadap suatu sektor berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB. Laju

pertumbuhan PDRB yang minus menggambarkan bahwa output dan permintaan akhir suatu sektor turun. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan PDRB dapat dilakukan dengan investasi pada sektor yang mempunyai koefisien keterkaitan tertinggi sehingga dapat mendorong perkembangan sektor lain yang terkait pada sektor tersebut.

## 4.2 Analisis Data dan Pembahasan

### 4.2.1 Analisis Keterkaitan Antar Sektor

Analisis keterkaitan antar sektor digunakan untuk mengetahui tingkat keterkaitan suatu sektor terhadap sektor-sektor lain dalam perekonomian, baik sebagai penyedia input bagi sektor lain (keterkaitan ke depan), maupun sebagai pemakai output dari sektor lain (keterkaitan ke belakang). Kemajuan perekonomian suatu sektor tidak mungkin dicapai tanpa dukungan sektor-sektor lainnya, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa untuk memproduksi sesuatu membutuhkan masukan yang dihasilkan oleh sektor lain. Dengan mengetahui keterkaitan antar sektor, dapat ditentukan prioritas investasi dalam sebuah perekonomian wilayah. Investasi sebaiknya diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki koefisien keterkaitan yang tinggi, sehingga dapat mendorong kemajuan sektor lain. Keterkaitan langsung hanya menghitung pengaruh langsung dari adanya keterkaitan antar sektor baik ke depan maupun ke belakang, sedangkan keterkaitan langsung tidak langsung menambah pengaruh tidak langsung dari keterkaitan antar sektor.

Tabel 9: Koefisien Keterkaitan Langsung, Langsung dan Tidak Langsung Sektor Sektor Perekonomian Jawa Tengah

Sektor	LKDP	Rank	LKBL	Rank	LTLKD	Rank	LTLKB	Rank
1. Jasa pertanian	1.5336	3	1.1726	9	1.6899	3	1.3233	8
2. Pertam. Dan Penggalian	1.0786	9	1.1903	8	1.0786	9	1.2017	9
3. Ind. Pengolah	2.3258	1	1.6286	1	2.6635	1	1.8505	1
4. List, gas, air minum	1.1398	7	1.6265	2	1.1595	7	1.6323	3
5. Bangunan/konstruksi	1.1187	8	1.5554	3	1.1187	8	1.6324	2
6. Perd. Hotel dan restoran	1.5693	2	1.3604	5	1.8258	2	1.5286	5
7. Pengang dan komunikasi	1.2692	5	1.4511	4	1.3151	5	1.4902	6
8. Kcu. Sewa & jasa perush	1.4160	4	1.2607	7	1.5361	4	1.5367	4
9. Jasa	1.1566	6	1.3419	6	1.2201	6	1.3914	7

Sumber: diolah dari tabel I-O Jawa Tengah Tahun 2000.

Keterangan:

LKDP : keterkaitan langsung ke depan

LKBL : keterkaitan langsung ke belakang

LTLKD : keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan

LTLKB : keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang

Pada tabel 9 diperlihatkan bahwa dari sisi keterkaitan langsung ke depan, sektor yang menduduki peringkat pertama adalah sektor industri pengolahan karena memiliki nilai koefisien paling besar dibanding sektor lain. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor prioritas karena mempunyai peranan yang besar dalam menyediakan bahan masukan bagi sektor lain sekaligus merupakan sektor pendukung bagi pertumbuhan sektor-sektor lain dalam perekonomian di Jawa Tengah. Sektor-sektor lain yang patut menjadi sektor prioritas dalam pembangunan regional di Jawa Tengah berdasarkan peringkat koefisien keterkaitan ke depan adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran peringkat ke-2, sektor pertanian peringkat ke-3, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan peringkat ke-4 serta sektor pengangkutan dan komunikasi peringkat ke-5.

Berdasarkan keterkaitan langsung ke belakang sektor prioritas adalah sektor industri pengolahan karena menduduki peringkat pertama dan mempunyai koefisien keterkaitan paling besar dibandingkan dengan sektor lain. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan sangat tergantung dengan sektor lain sebagai peminta bahan masukan dari sektor lain sehingga dapat mendorong perkembangan sektor lain. Sektor lain yang patut dijadikan sektor prioritas dalam pembangunan regional di Jawa Tengah berdasarkan peringkat koefisien keterkaitan ke belakang adalah sektor listrik, gas, dan air bersih peringkat ke-2, sektor bangunan peringkat ke-3, sektor pengangkutan dan komunikasi peringkat ke-4, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran peringkat ke-5.

Sektor industri pengolahan yang merupakan sektor dengan kontribusi sektoral terbesar dalam PDRB ternyata memiliki angka keterkaitan langsung terbesar pula baik ke depan maupun ke belakang. Apabila investasi diarahkan

secara optimal pada sektor industri pengolahan maka sektor industri pengolahan dapat mendorong perkembangan sektor lain yang terkait. Kemajuan sektor industri pengolahan yang didukung oleh sektor-sektor lain yang terkait dalam jangka panjang dapat merubah struktur perekonomian Jawa Tengah menjadi perekonomian yang berbasis industri.

Berdasarkan koefisien keterkaitan langsung dan tidak langsung kedepan sektor yang menduduki peringkat pertama adalah sektor industri pengolahan karena mempunyai koefisien keterkaitan paling besar dibanding sektor lain. Disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran yang menduduki peringkat ke-2 dan sektor pertanian yang menduduki peringkat ke-3. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor penyedia input bagi sektor-sektor lain dalam pembangunan regional di Jawa Tengah.

Berdasarkan koefisien keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang sektor yang menduduki peringkat pertama adalah sektor industri pengolahan karena mempunyai koefisien keterkaitan paling besar dibandingkan sektor lain. Disusul sektor bangunan yang menduduki peringkat ke-2 dan sektor listrik, gas dan air bersih yang menduduki peringkat ke-3. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor ini memberikan sumbangan yang besar bagi perkembangan sektor-sektor lain dalam pembangunan regional di Jawa Tengah.

#### 4.2.2 Analisis pengganda Output

Analisis pengganda output (*output multiplier*) ditujukan untuk mengetahui pengaruh adanya permintaan akhir terhadap peningkatan sektor itu sendiri, sebagai akibat adanya dampak transfer atau dampak awal (*first*), dampak industri (*indust*), maupun dampak konsumsi (*cons'm*). Pengganda output sederhana ditujukan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan permintaan akhir suatu sektor terhadap output sektor lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan pengganda output total ditujukan untuk mengetahui pengaruh perubahan permintaan akhir dalam suatu sektor terhadap output sektor lain baik langsung, tidak langsung maupun induksi.

Tabel 10: Koefisien Pengganda Output pada Perekonomian Jawa Tengah

Sektor	Initial	First	Indust	Sederhana	Cons'm	Total
1. Jasa pertanian	1,00	0.12	0.05	1.17	0.10	1.27
2. Pertam. Dan Penggalian	1,00	0.13	0.06	1.19	0.08	1.27
3. Ind. Pengolah	1,00	0.45	0.18	1.63	0.49	2.12
4. List, gas, air minum	1,00	0.42	0.20	1.62	0.42	2.04
5. Bangunan/konstruksi	1,00	0.39	0.17	1.56	0.41	1.97
6. Perd. Hotel dan restoran	1,00	0.25	0.11	1.36	0.15	1.51
7. Pengang dan komunikasi	1,00	0.31	0.14	1.45	0.16	1.61
8. Keu. Sewa & jasa perush	1,00	0.19	0.09	1.28	0.11	1.39
9. Jasa	1,00	0.23	0.11	1.34	0.20	1.54

Sumber: diolah dari tabel I-Q Jawa Tengah 2000

Pada tabel 10 terlihat bahwa berdasarkan koefisien pengganda output sektor industri pengolahan mempunyai koefisien pengganda output sederhana dan pengganda output total paling besar, dengan koefisien pengganda output sederhana sebesar 1.63 dan koefisien pengganda output total sebesar 2.12. Hal ini berarti bahwa Apabila terjadi perubahan permintaan akhir (injeksi) terhadap output sederhana pada sektor industri pengolahan sebesar Rp 1 juta, maka injeksi itu akan menyebabkan kenaikan output pada sektor industri pengolahan sebesar Rp 1.630.000. Hal ini disebabkan oleh dampak peningkatan output (*initial*) sebesar Rp 1 juta, dampak transfer atau dampak awal sebesar Rp 450.000, dan dampak industri Rp 180.000. Sementara terhadap output total apabila ditambah dampak konsumsi, maka akan meningkatkan output sektor ini sebesar Rp 2.120.000. Berdasarkan pengganda output sederhana, sektor-sektor lain yang menduduki peringkat lima besar berturut-turut adalah sektor bangunan sebesar 1.56, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1.45, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 1,36. Sedangkan berdasarkan koefisien pengganda output total, sektor-sektor lain menduduki peringkat lima besar adalah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 2.05, sektor bangunan sebesar 1.96, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1.61, serta sektor jasa sebesar 1.54.

Sektor industri pengolahan yang merupakan sektor dengan kontribusi sektoral terbesar dalam PDRB ternyata mempunyai angka pengganda output paling besar pula dibandingkan sektor lain. Hal ini menunjukkan bahwa apabila

ada perubahan permintaan akhir terhadap sektor industri pengolahan maka sektor ini mampu memberikan dampak terhadap pengganda output paling besar, sehingga nilai total dari output yang dihasilkan sektor industri pengolahan meningkat sebesar koefisien penggandanya. Koefisien pengganda output yang besar mencerminkan bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor prioritas karena mempunyai hubungan yang kuat dengan sektor lain.

#### 4.2.3 Analisis Pengganda Pendapatan

Pengganda pendapatan menunjukkan besarnya perubahan pendapatan pada masing-masing sektor sebagai dampak terjadinya perubahan permintaan akhir. Besarnya koefisien ini akan mempengaruhi langsung pendapatan yang diterima masing-masing sektor. Pengganda pendapatan sederhana ditujukan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan permintaan akhir suatu sektor terhadap total pendapatan yang diterima sektor lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan pengganda pendapatan total ditujukan untuk mengetahui pengaruh permintaan akhir dalam suatu sektor terhadap total pendapatan yang diterima sektor lain baik langsung, tidak langsung, maupun induksi.

Tabel 11: Koefisien Pengganda Pendapatan pada Perekonomian Jawa Tengah.

Sektor	Initial	first	indust	Cons'm	sederh	Total	Type I	Type II
1	0.04	0.02	0.01	0.01	0.06	0.07	1.57	1.86
2	0.02	0.01	0.01	0.01	0.04	0.05	1.82	2.15
3	0.22	0.05	0.02	0.05	0.29	0.34	1.33	1.57
4	0.17	0.06	0.02	0.05	0.25	0.30	1.45	1.72
5	0.17	0.05	0.02	0.04	0.24	0.28	1.38	1.63
6	0.05	0.03	0.01	0.01	0.09	0.10	1.78	2.10
7	0.05	0.03	0.02	0.02	0.10	0.12	1.98	2.34
8	0.03	0.02	0.01	0.01	0.06	0.08	2.03	2.41
9	0.07	0.03	0.02	0.02	0.12	0.14	1.63	1.93

Sumber: diolah dari tabel I-O Jawa Tengah 2000

Pada tabel 11 terlihat bahwa berdasarkan koefisien pengganda pendapatan sektor industri pengolahan mempunyai pengganda pendapatan sederhana dan pengganda pendapatan total paling besar, dengan koefisien pengganda pendapatan sederhana sebesar 0.29 dan koefisien pengganda output total sebesar 0.34. Hal ini

berarti bahwa apabila terjadi perubahan permintaan akhir sebesar Rp 1 juta pada sektor industri pengolahan, maka injeksi tersebut akan menyebabkan kenaikan pendapatan pada sektor industri pengolahan sebesar Rp 290.000. Hal ini disebabkan oleh dampak peningkatan output (*initial*) sebesar Rp 220.000, dampak awal sebesar Rp 50.000, dampak industri sebesar Rp. 20.000. Bila ditambah dampak konsumsi akan menghasilkan pengganda pendapatan total sebesar Rp 340.000. Berdasarkan pengganda pendapatan sederhana sektor lain yang menduduki lima besar adalah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0.25, sektor bangunan sebesar 0.24, sektor jasa sebesar 0.12, serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 0.10. Sedangkan berdasar koefisien pengganda pendapatan total sektor lain yang menduduki lima besar masih tetap yaitu listrik, gas dan air bersih sebesar 0.30, sektor bangunan sebesar 0.28, sektor jasa sebesar 0.14, serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 0.12.

Pengganda pendapatan type I merupakan perbandingan antara pengganda pendapatan sederhana dengan koefisien teknis upah dan gaji rumah tangga. Berdasarkan koefisien pengganda pendapatan type I sektor yang memiliki koefisien paling besar adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 2.03. Hasil analisis koefisien pengganda pendapatan type I ini di ilustrasikan sebagai berikut: Misal nilai koefisien pengganda pendapatan type I untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan industri pengolahan adalah sebesar 2,03, hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan permintaan akhir output dari sektor industri pengolahan sebesar satu satuan rupiah akan meningkatkan pendapatan rumah tangga yang bekerja disektor tersebut sebesar 2,03 kali. Sektor lain yang menduduki lima besar adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1.98; sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1.82; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1.78; serta sektor jasa sebesar 1.63.

Pengganda pendapatan type II merupakan pengembangan dari pengganda pendapatan total. Pada pengganda pendapatan type II suatu sektor merupakan perbandingan antara pengganda pendapatan total dengan koefisien teknis upah dan gaji rumah tangga sektor tersebut. Berdasarkan pengganda pendapatan type II ini, sektor yang memiliki koefisien paling besar masih tetap sama yaitu sektor



keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 2.41; sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 2.34; sektor pertambangan dan penggalian sebesar 2.15; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 2.10 serta sektor jasa sebesar 1.93. Implikasi dari pengganda pendapatan type II ini masih sama dengan pengganda pendapatan type I hanya saja pengganda ini memasukkan dampak pengganda konsumsi dalam perhitungannya. Ini berarti bahwa setiap penambahan permintaan akhir output dari sektor industri pengolahan sebesar satu satuan rupiah akan meningkatkan pendapatan rumah tangga yang bekerja disektor tersebut sebesar koefisien penggandanya.

#### 4.2.4 Analisis Pengganda Tenaga Kerja

Analisis pengganda tenaga kerja menunjukkan kemampuan suatu sektor dalam memberikan penyediaan lapangan kerja apabila terjadi perubahan dalam permintaan akhir.

Tabel 12: Koefisien Pengganda Tenaga Kerja pada Perekonomian Jawa Tengah

Sektor	initial	first	indust	Cons'm	Type I	Type II
1. Jasa pertanian	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.13
2. Pertam. Dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	1.32
3. Ind. Pengolah	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	5.29
4. List, gas, air minum	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58	6.41
5. Bangunan/kontruksi	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	2.31
6. Perd. Hotel dan restoran	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	1.40
7. Pengang dan komunikasi	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	1.72
8. Keu. Sewa & jasa perush	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	5.98
9. Jasa	0.01	0.00	0.00	0.00	1.07	1.13

Sumber: diolah dari tabel I-O Jawa Tengah tahun 2000.

Pada tabel 12 terlihat bahwa berdasarkan koefisien pengganda tenaga kerja type I sektor yang memiliki koefisien paling besar adalah sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan sebesar 4.45. Sektor lain yang menduduki lima besar adalah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 3.58, sektor industri pengolahan sebesar 3.51, sektor bangunan sebesar 1.66, serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1.55. Hasil analisis pengganda tenaga kerja type I ini diilustrasikan

sebagai berikut: misalnya nilai koefisien pengganda tenaga kerja type I untuk sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 4.45, hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan permintaan akhir dari sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar satu satuan rupiah akan mengakibatkan kenaikan tenaga kerja terhadap sektor tersebut sebesar 4 orang.

Berdasarkan koefisien pengganda tenaga kerja type II sektor yang memiliki koefisien paling besar adalah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 6.41. Sektor lain yang menduduki lima besar adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 5.98, sektor industri pengolahan sebesar 5.29, sektor bangunan sebesar 2.31, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1.72. Implikasi pengganda tenaga kerja type II ini masih sama dengan pengganda tenaga kerja type I hanya saja pengganda ini memasukkan dampak pengganda konsumsi dalam perhitungannya. Ini berarti bahwa setiap penambahan permintaan akhir dari sektor listrik, gas dan air bersih sebesar satu satuan rupiah akan mengakibatkan kenaikan tenaga kerja terhadap sektor tersebut sebesar koefisien penggandanya.

#### **4.2.5 Analisis Ketergantungan Ekspor, Pengganda Ekspor terhadap Output, dan Pengganda Ekspor terhadap Tenaga Kerja**

Derajat ketergantungan ekspor menunjukkan proporsi tingkat produksi suatu subsektor yang secara langsung maupun tidak langsung dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan ekspor.

Tabel 13: Koefisien ketergantungan Ekspor, Pengganda Ekspor terhadap Output, Pengganda Ekspor terhadap Tenaga Kerja

Sektor	Ketergantungan Ekspor	Rank	Mltp. Ekspor Terhadap Output	Rank	Mltp. Ekspor terhadap Tenaga kerja	Rank
1	0.476631	1	3.141780	2	0.009613	3
2	0.333040	4	22.981196	1	0.024594	2
3	0.133785	6	0.2771574	5	0.000111	5
4	0.203194	5	0	-	0	-
5	0.029578	9	0	-	0	-
6	0.358067	2	1.580904	4	1.902521	1
7	0.352132	3	2.762478	3	0.003813	4
8	0.081158	8	0	-	0	-
9	0.100960	7	0	-	0	-

Sumber: Data diolah dari tabel input-output Jawa Tengah tahun 2000

Pada tabel 13 terlihat bahwa berdasarkan angka derajat ketergantungan ekspor sektor yang mempunyai koefisien paling besar adalah sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar luar negeri. Kenyataan ini merupakan bukti bahwa pada tahun 2000 ekspor Indonesia terutama Jawa Tengah masih didominasi oleh komoditas primer berupa bahan baku atau barang setengah jadi. Sektor lain yang menduduki lima besar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0.358067, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 0.352132, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0.333040, serta sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0.203194.

Angka pengganda ekspor terhadap output mengukur dampak aktifitas ekspor dari suatu sektor terhadap peningkatan output bagi perekonomian secara keseluruhan atau nilai total output yang dihasilkan sebagai akibat adanya perubahan tingkat output sebesar satu satuan mata uang. Berdasarkan angka pengganda ekspor terhadap output sektor yang mempunyai koefisien paling besar adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 22.981196. Implikasi dari pengganda ekspor terhadap output digambarkan sebagai berikut: apabila volume ekspor sebesar 1.959.149 (lampiran 2) pada sektor pertambangan dan penggalian

maka akan terjadi kenaikan output sebesar 2298%. Sektor lain yang menduduki lima besar adalah sektor pertanian sebesar 3.141780, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 2.762478, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1.580904, serta sektor industri pengolahan sebesar 0.277054.

Angka pengganda ekspor terhadap tenaga kerja menunjukkan dampak kegiatan ekspor suatu sektor terhadap penyerapan tenaga kerja bagi keseluruhan perekonomian atau menunjukkan dampak perubahan tingkat ekspor sebesar satu satuan mata uang terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja bagi keseluruhan perekonomian. Berdasarkan angka pengganda ekspor terhadap tenaga kerja sektor yang mempunyai koefisien paling adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1.902521. Implikasi dan pengganda ekspor terhadap tenaga kerja digambarkan sebagai berikut: Apabila ekspor sebesar 737.488.962 (lampiran 2) pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, maka akan meningkatkan kesempatan kerja sebesar 190% pada sektor tersebut. Sektor yang menduduki lima besar adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0.024594; sektor pertanian sebesar 0.009613; sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 0.003813; serta sektor industri sebesar 0.000111.

### 4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis keterkaitan dengan menggunakan analisis keterkaitan langsung, langsung dan tidak langsung ke depan dan keterkaitan langsung, langsung dan tidak langsung ke belakang diketahui bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor yang patut menjadi prioritas sektoral dalam pembangunan regional di Jawa Tengah. Sektor industri pengolahan mempunyai koefisien keterkaitan yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor lain dalam PDRB Jawa Tengah. Dilihat dari keterkaitan langsung ke depan dan ke belakang sektor industri pengolahan mempunyai koefisien sebesar 2.3258 dan 1.6286. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan mempunyai potensi yang bagus untuk dikembangkan terutama apabila dilakukan investasi yang cukup sehingga dapat mendorong perkembangan sektor lain yang terkait.

Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan yang dikemukakan oleh Nurkse (dalam Djojohadikusumo, 1994:100) yaitu pembangunan yang berimbang dengan berbagai macam investasi yang terkait satu sama lain. Investasi tersebut dilakukan secara bersamaan di berbagai bidang kegiatan industri yang saling melengkapi sehingga menciptakan ekspansi pada pasar barang dan menimbulkan komplementaritas pada permintaan. Sedangkan Hirschman (dalam Djojohadikusumo, 1994:103) menyatakan tentang strategi pembangunan yang tidak seimbang untuk menuju pada suatu struktur ekonomi yang lebih berimbang. Hirschman mengungkapkan segi keterkaitan (*linkage*) diantara berbagai macam kegiatan ekonomi. Hal itu menyangkut keterkaitan antar sektor maupun keterkaitan yang berlaku didalam lingkungan suatu sektor tertentu (intra-sektor). Setiap proyek investasi di suatu industri tertentu selalu terkait dengan kegiatan ditahap sebelumnya ( menggunakan input pada sektor sebelumnya) maupun tahap sesudahnya (menghasilkan output yang digunakan sektor sesudahnya. Dalam analisis keterkaitan kegiatan industri ditahap sebelumnya (industri hilir) bersifat *forward linkage*, sedangkan keterkaitan pada kegiatan industri sesudahnya (industri hulu) bersifat *backward linkage*. Hirschman juga berpendapat bahwa keterkaitan antar sektor dan antar industri di negara-negara berkembang masih sangat lemah. Di Indonesia permasalahan tersebut disebabkan karena struktur industri yang masih belum dalam (*shallow*) dan belum seimbang (*unbalanced*). Kondisi itu diperparah dengan struktur industri yang masih kuasi monopolistik dan oligopolistik (Koncoro, 1997:299).

Berdasarkan hasil analisis pengganda dengan menggunakan analisis pengganda output, pengganda pendapatan, dan pengganda tenaga kerja sektor prioritas ditentukan berdasarkan tingginya nilai koefisien pengganda yang dimiliki masing-masing sektor. Dilihat dari pengganda output (tabel 11) sektor industri pengolahan mempunyai pengganda output total tertinggi sebesar 2.12. Dilihat dari pengganda pendapatan (tabel 12) sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor yang mempunyai koefisien pengganda type II tertinggi yaitu 2.41. Sedangkan berdasarkan pengganda tenaga kerja (tabel 13) sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang mempunyai koefisien pengganda type II

tertinggi yaitu 6.41. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang patut dijadikan prioritas sektoral dalam pembangunan regional di Jawa Tengah karena mempunyai *multiplier* yang besar sehingga setiap perubahan injeksi atau permintaan akhir akan meningkatkan output, pendapatan, dan tenaga kerja di sektor yang bersangkutan sebesar koefisien penggandanya. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah memaksimalkan output sektor produksi, maka tambahan permintaan akhir harus dialokasikan sepenuhnya ke sektor dengan pengganda output tertinggi yaitu sektor industri pengolahan. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah memaksimalkan pendapatan rumah tangga yang bekerja pada sektor produksi, maka tambahan permintaan akhir harus dialokasikan sepenuhnya ke sektor dengan pengganda pendapatan tertinggi yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan jika tujuan yang ingin dicapai adalah memaksimalkan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor produksi maka tambahan permintaan akhir harus dialokasikan sepenuhnya ke sektor dengan pengganda tenaga kerja tertinggi yaitu sektor listrik, gas dan air bersih.

Dari koefisien pengganda dapat diketahui bahwa perekonomian Jawa Tengah telah mengalami transformasi dari perekonomian yang berbasis agraris menuju perekonomian yang berbasis industri yang ditandai dengan meningkatnya peranan sektor sekunder. Oleh karena itu kebijakan pembangunan harus menekankan pada sektor sekunder dengan menciptakan keterkaitan baik ke depan maupun ke belakang pada sektor sekunder.

Kebijakan ini sesuai dengan konsep pembangunan Singer (dalam Djojohadikusomo1994:106) bahwa suatu transformasi dari sektor agraris ke sektor- sektor diluar agraris (sektor industri) harus memiliki dampak pengganda terhadap perekonomian secara menyeluruh. Singer juga berpendapat bahwa strategi pembangunan harus didasarkan pada pilihan skala prioritas supaya sumber daya dan sumber dana yang tersedia dalam jumlah yang terbatas diarahkan pada jenis-jenis industri tertentu yang dapat meluaskan landasan kegiatan ekonomi,

mendukung ekspansi pasar serta meningkatkan permintaan efektif dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis derajat ketergantungan ekspor, dampak pengganda ekspor terhadap output dan tenaga kerja menunjukkan bahwa sektor yang berorientasi pada pasar luar negeri adalah sektor pertanian. Sedangkan dampak aktifitas ekspor yang dapat meningkatkan output maupun tenaga kerja adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan koefisien sebesar 22.98 dan sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan koefisien sebesar 1.90. Pada negara berkembang komoditas ekspor banyak didukung oleh ekspor bahan baku dari sektor primer. Oleh karena itu strategi pembangunan yang harus diterapkan dalam pembangunan regional di Jawa Tengah harus lebih menekankan pada kebijakan promosi ekspor.

Kebijakan ini sesuai dengan teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk ekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*). Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun secara internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut.

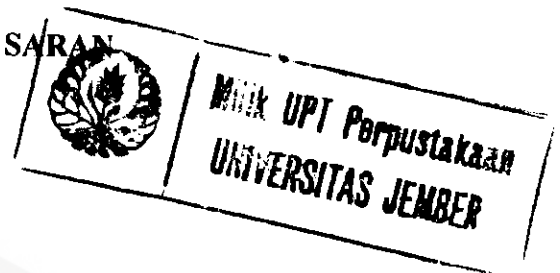
Fenomena industri pengolahan sebagai prioritas sektoral dapat digambarkan bahwa sebelum terjadi krisis ekonomi, industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 8,71% pada tahun 1996, tetapi tahun 1997 pertumbuhannya menurun sebesar 2,87%. Adanya krisis ekonomi pada tahun 1998 menyebabkan sektor industri pengolahan berkontraksi hingga minus 14,6% (tabel 8). Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan walaupun menjadi prioritas sektoral mudah terpengaruh oleh faktor eksternal yaitu krisis

ekonomi nasional. Untuk mencegah supaya sektor industri pengolahan tidak mudah terpengaruh krisis ekonomi, pemerintah harus memberikan injeksi langsung kepada sektor industri pengolahan. Selain itu prioritas investasi harus lebih diarahkan pada sektor industri pengolahan secara berkesinambungan. *Recovery* ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui injeksi langsung dan investasi menyebabkan sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,82% pada tahun 1999 dan meningkat sebesar 3,19% pada tahun 2000 (tabel 8).

Menurut tabel input-output Jawa Tengah (lampiran 2) industri pengolahan berdasarkan kapasitasnya menunjukkan bahwa subsektor yang mempunyai kapasitas paling besar adalah subsektor industri makanan, minuman dan tembakau sebesar 43,8%; disusul oleh subsektor industri lain sebesar 38,9%. Sedangkan subsektor yang mempunyai kapasitas paling kecil adalah subsektor industri pengilangan minyak sebesar 17,2%. Sedangkan pemasaran hasil produksi (output) sektor industri pengolahan sebagai prioritas sektoral mempunyai komposisi sebagai berikut: jumlah output yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar luar negeri (ekspor) sebesar 48,3%; jumlah output yang digunakan sebagai input dalam proses produksi sektor lain yang terkait sebesar 26,9%; jumlah output yang digunakan langsung untuk konsumsi rumah tangga sebesar 18,2%; jumlah output yang digunakan untuk pembentukan modal tetap sebesar 4,7%; dan jumlah output yang digunakan untuk perubahan stok sebesar 1,9%. Hal ini menunjukkan bahwa output sektor industri pengolahan digunakan secara penuh untuk memenuhi kebutuhan pasar.



## V. KESIMPULAN DAN SARAN



## 5.1 Kesimpulan

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa:

1. berdasarkan kriteria keterkaitan ke depan sektor prioritas dalam pembangunan di Jawa Tengah adalah sektor industri pengolahan menduduki peringkat pertama; sektor perdagangan, hotel dan restoran peringkat ke-2; dan sektor pertanian peringkat ke-3. Berdasarkan kriteria keterkaitan ke belakang sektor prioritas adalah sektor industri pengolahan peringkat pertama; sektor listrik, gas dan air bersih peringkat ke-2; dan sektor bangunan peringkat ke-3.
2. berdasarkan angka pengganda output sektor prioritas adalah sektor industri pengolahan sebesar 2.12; sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 2.05; sektor bangunan sebesar 1.96; sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1.61; serta sektor jasa sebesar 1.55. Berdasarkan angka pengganda pendapatan sektor prioritas adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 2.41; sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 2.34; sektor pertambangan dan penggalian sebesar 2.15; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 2.10, serta sektor jasa sebesar 1.93. Berdasarkan angka pengganda tenaga kerja sektor prioritas adalah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 6.41; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 5.98; sektor industri pengolahan sebesar 5.29; sektor bangunan sebesar 2.31; sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1.72.
3. berdasarkan angka derajat ketergantungan ekspor sektor prioritas adalah sektor pertanian sebesar 0.476631; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0.358067; sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 0.352132; sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0.333040; serta sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0.203194. Berdasarkan angka pengganda ekspor terhadap output sektor prioritas adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 22.981196; sektor pertanian sebesar 3.141780; sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 2.762478; sektor perdagangan, hotel dan restoran

sebesar 1.580904; serta sektor industri pengolahan sebesar 0.277054. Berdasarkan angka pengganda ekspor terhadap tenaga kerja sektor prioritas adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1.902521; sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0.024594; sektor pertanian sebesar 0.009613; sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 0.003813; serta sektor industri sebesar 0.000111.

## 5.2 Saran

Dari kesimpulan pada point 5.1 beberapa hal yang dapat disarankan dalam rangka pembangunan ekonomi wilayah Jawa Tengah antara lain:

1. harus ada injeksi langsung dari pemerintah untuk memperkuat prioritas sektoral supaya tidak mudah terpengaruh krisis ekonomi nasional, terutama pada sektor industri pengolahan;
2. untuk memperkuat keterkaitan, baik keterkaitan ke depan maupun keterkaitan ke belakang perlu meningkatkan investasi melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada sektor prioritas terutama sektor industri pengolahan, sehingga dapat mendorong perkembangan sektor lain;
3. perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa agar dapat bersaing dengan daerah lain. Peningkatan SDM dan teknologi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan mengadopsi teknologi dari daerah lain yang lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua. 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta : LPFE-UI.
- Arsyad, Lincolin. 1992. *Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua Cetakan I*. Yogyakarta : BP STIE YKPN.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua Cetakan II*. Yogyakarta: BP STIE YKPN.
- Aziz, Ian Jaya. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta : LPFE UI.
- Badan Pusat Statistik. 2000. *Tabel Input-Output Jawa Tengah*. Semarang, Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Jawa Tengah dalam Angka*. Semarang, Jawa Tengah.
- Biro Pusat Statistik. 1995. *Kerangka Teori dan Analisis Tabel Input-Output*. Jakarta.
- Budiharsono, Sugeng. 1989. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta:PAU Ekonomi UI
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi : Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES
- Gaspersz, Vicent. 1990. *Analisa Kuantitatif untuk Perencanaan*. Bandung: Tarsito.
- Halimy, Ahmad. 2001. *Penentuan Prioritas Sektoral dalam Pembangunan Regional di Kabupaten Sumenep*. Jember: Skripsi Tidak di Publikasikan. FE-UJ
- Husseini, Martani. 2000. *Mencermati Misteri Globalisasi: Menata Ulang Strategi Pemasaran Internasional Melalui pendekatan Resource Based*. dalam Usahawan No. 02 TH XXIX Februari 2000.
- Kuncoro, Mudrajat. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. Edisi Pertama. Cetakan I*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- . 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori Masalah dan Kebijakan. Edisi Pertama. Cetakan II*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.

- , 2001. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Kuncoro, M., A. Adji., dan R. Pradiptyo. 1997. *Ekonomi Industri: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Yogyakarta: Widya Sarana Informatika
- Kosgoro. 2000. *Percepatan Otonomi Daerah Sebagai Implementasi Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999*. dalam Kosgora September 2000.
- Muljana, BS. 1995. *Perencanaan Pembangunan nasional*. Jakarta: UIP.
- Saktiyanto, AM.H. 2000. *Analisis Keterkaitan Antar Sektor di Kabupaten Jember*. Jember; Skripsi tidak dipublikasikan. FE-UJ.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta : LPFE-UI.
- Usman, W. Dan Spillane, D. 1988. *Materi Pokok Ilmu Ekonomi Regional*. Jakarta Karunika.

Lampiran 1: Klasifikasi Sektor Input-Output Propinsi Jawa Tengah

1. Pertanian
2. Pertambangan dan galian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air bersih
5. Bangunan
6. Perdagangan, hotel dan restoran
7. Pengangkutan dan komunikasi
8. Keuangan persewaan dan jasa perusahaan
9. Jasa
190. Jumlah input antara
200. Impor
201. Upah dan gaji
202. Surplus usaha
203. Penyusutan
204. Pajak tak langsung
205. Subsidi
209. Nilai tambah bruto
210. Jumlah input
180. Jumlah permintaan antara
301. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
302. Pengeluaran konsumsi pemerintah
303. Pembentukan modal tetap
304. Perubahan stok
305. Ekspor barang dagangan
309. Jumlah permintaan akhir
600. Jumlah output

Lampiran 2 : Tabel Input Output Jawa Tengah Atas Dasar Harga Produsen Tahun 2000

Sektor	1	2	3	4	5	6	7
1	115.664.687	100.308	1.696.557.320	0	17.066.681	99.121.497	338.294
2	4.274	93.568	66.422.445	4.797.586	35.462.017	15.245	46.236
3	214.307.916	5.081.701	1.775.886.959	28.122.326	192.122.655	242.904.278	61.399.335
4	1.394.315	33.469	43.546.677	18.297.492	412.264	28.118.188	3.534.560
5	10.470.575	1.042.824	12.270.126	3.436.975	1.301.518	20.518.007	15.377.900
6	39.187.223	3.490.744	567.809.514	17.882.405	118.375.127	90.396.725	31.605.361
7	15.557.219	3.441.791	178.631.050	896.771	3.030.811	110.092.622	53.694.896
8	10.716.030	3.402.664	121.133.731	15.992.067	44.230.235	207.566.750	37.251.404
9	8.953.498	1.073.946	23.425.736	1.560.439	2.093.239	26.284.749	50.135.266
<b>190</b>	<b>416.255.737</b>	<b>17.761.015</b>	<b>4.485.683.558</b>	<b>90.986.061</b>	<b>414.094.547</b>	<b>825.018.061</b>	<b>253.383.252</b>
200	138.034.981	3.347.780	2.189.057.488	37.188.355	192.186.211	159.952.263	39.801.236
201	510.992.556	38.922.797	752.260.644	19.685.911	261.300.055	570.079.375	132.575.183
202	2.366.772.033	63.126.768	1.784.637.957	33.688.624	158.176.770	1.408.712.997	270.711.250
203	47.327.197	8.580.426	394.054.189	32.314.217	34.940.615	135.396.191	106.153.493
204	24.029.636	3.450.769	368.621.895	1.327.631	24.382.820	156.930.641	8.716.306
<b>209</b>	<b>3.087.156.403</b>	<b>117.428.540</b>	<b>5.488.632.173</b>	<b>124.204.738</b>	<b>670.986.471</b>	<b>2.431.071.467</b>	<b>557.957.468</b>
210	3.503.412.140	135.189.555	9.974.315.731	215.190.798	1.085.081.017	3.256.089.527	811.340.721

Sumber: diolah dari tabel input output Jawa Tengah tahun 2000

8	9	180	301	302	303	304
6.848.595	6.937.457	1.942.634.839	839.712.189	0	122.569.005	67.002.462
138.246	105.227	107.084.844	0	0	0	26.145.562
110.887.249	62.058.182	2.692.770.601	1.815.008.697	0	464.309.741	187.533.900
11.427.590	2.117.889	108.882.444	106.308.354	0	0	0
66.641.116	2.837.255	133.896.296	0	0	951.184.721	0
82.442.073	12.415.662	963.604.834	1.379.008.398	0	176.027.333	0
54.162.801	5.769.103	425.277.064	247.228.567	0	35.413.785	0
61.030.734	11.962.960	513.286.575	645.839.392	1.047.198.624	0	0
29.293.162	7.789.628	150.609.663	341.475.787	0	0	0
<b>422.871.566</b>	<b>111.993.363</b>	<b>7.038.047.160</b>	<b>5.374.581.384</b>	<b>1.047.198.624</b>	<b>1.749.504.585</b>	<b>280.681.924</b>
69.517.175	36.846.987	2.865.932.476				
935.563.943	167.955.079	3.389.335.543				
608.790.747	118.704.106	6.813.321.252				
115.759.261	46.430.240	920.955.829				
53.821.899	10.155.675	651.437.272				
<b>1.783.453.025</b>	<b>380.092.087</b>	<b>14.640.982.372</b>				
2.206.324.591	492.085.450	21.679.029.530				



305	309	600
531.493.644	1.560.777.300	3.503.412.140
1.959.149	28.104.711	135.189.555
4.814.692.793	7.281.545.131	9.974.315.731
0	106.308.354	215.190.798
0	951.184.721	1.085.081.017
737.448.962	2.292.484.693	3.256.089.527
103.421.306	386.063.658	811.340.721
0	1.693.038.016	2.206.324.591
0	341.475.787	492.085.450
<b>6.189.015.854</b>	<b>14.640.982.371</b>	<b>21.679.029.530</b>

